



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut disampaikan hasil pelaksanaan pengendalian pembangunan sebagai berikut:

A. APBD yang Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2019 mengelola APBD sebesar Rp2.383.358.028.670,00 yang terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp1.267.958.570.264,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.115.399.458.406,00 terdistribusi melalui pelaksanaan 175 program dan 671 kegiatan pada 45 OPD.

B. Target dan Realisasi Fisik

Capaian Fisik Belanja Langsung sampai akhir triwulan II Tahun 2019 diinformasikan sebagai berikut :

Bulan	Fisik		Deviasi	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi (Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi Penyebab)
	Target (%)	Realisasi (%)		
s.d. 30 Juni 2019	57,63	50,64	6,99	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa lelang konstruksi pelaksanaannya mundur karena harus menyesuaikan dengan Permen PU No.7 Tahun 2019 • Beberapa paket pekerjaan gagal lelang karena penawar pekerjaan tidak lolos syarat kualifikasi • Gagal lelang DED yang berimbas pada lelang fisik konstruksi • Paket pengadaan direncanakan dengan metode E-Katalog tetapi barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam daftar E-Katalog sehingga metode pengadaan dirubah dengan metode lelang yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode E-Katalog

C. Target dan Realisasi Keuangan

Target dan realisasi Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja disampaikan melalui tabel berikut :

Bulan	Jenis Belanja	Target TW I		Realisasi TW I		Deviasi	Keterangan
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
s.d. 30 Juni 2019	Belanja Pegawai	57.516.500.336	51,26	41.871.900.272	37,32	13,94	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kesalahan penempatan pada kode rekening, sehingga harus dilakukan perubahan penjabaran DPA • Honor Pansel tertunda karena pelaksanaan lelang yg hrs menunggu dari Komisi ASN pusat • Honor panitia PBJ belum bisa direalisasikan karena kesalahan penempatan pada rekening honor panitia pelaksanaan kegiatan
	Belanja Barang dan Jasa	319.785.709.215	51,67	223.457.098.216,51	36,11	15,56	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan jadwal pameran pada DKUKMP karena menyesuaikan pusat (rencana maret menjadi agustus) • Belanja perjalanan dinas pada kegiatan peningkatan manajemen perkoperasian(DAK) karena sesuai pentahapan pencairan DAK belum bisa dicairkan • Efisiensi kegiatan rapat koordinasi dan perjalanan dinas untuk appraisal kawasan industry

Bulan	Jenis Belanja	Target TW I		Realisasi TW I		Deviasi	Keterangan
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
							<p>Piyungan pada Perubahan APBD 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran sewa-sewa untuk seleksi ASN direncanakan TW 2 namun jadwal sampai saat ini masih menunggu dari BKN • Anggaran perjalanan dinas ke Kementrian BIG dan ATR dalam rangka konsultasi percepatan RDTR semula diusulkan 3 RDTR namun menjadi 1 karena hanya di setujui 1 RDTR • Rehabilitasi pemeliharaan jalan (menunggu lelang di LPBJ) . • Gagal lelang kegiatan padat karya • Honor narasumber yang direncanakan untuk Bupati/Wabup tidak bisa dibayarkan karena narasumber disposisi pada PNS Pemda (tidak boleh menerima honor narsum)
	Belanja Modal	144.684.812.164	37,52	33.436.333.945	8,67	28,85	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan computer untuk mendukung kegiatan data spasial memerlukan spesifikasi khusus sehingga masih kesulitan daftar nya di e katalog • Gagal lelang DED untuk 5 jembatan sehingga proses lelang fisik/konstruksi juga tertunda • Review DED IPAL Piyungan mengakibatkan pelaksanaan mundur(Review krn DED sebelumnya dibuat tahun 2016 , ketika akan dilaksanakan 2019 ternyata volume IPAL sudah tidak memenuhi). • Pengadaan kendaraan <i>skylift</i> pemasang lampu terkendala krn barang tidak tersedia di daftar ekatalog (akhirnya baru mulai proses lelang) • Pengadaan pagar jalan, pengembangan perekayasa lalu lintas proses di LPBJ • Pengadaan kendaraan eskavator dan trailer 1,5 M) tidak tersedia di E katalog sehingga harus dilelangkan • Penyediaan sarpras air minum (DAK) mundur pelaksanaannya krn lelang mundur • Pengadaan IPAL Karangtalun dan panggungharjo, penguatan tebing dan avour mundur karena lelangnya mundur • Ada Permen PU per 25 Maret ttg Konstruksi, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur.
	TOTAL	521.987.021.715	46,74	298.765.332.433,51	26,75	19,99	

D. Prosentase Kegiatan dengan deviasi fisik \geq 5% dan Keuangan \geq 10%

Kriteria	% Terhadap Keseluruhan Kegiatan	Faktor Penghambat
Deviasi fisik \geq 5 %	4,29%	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan fisik mundur dari jadwal semula karena aturan dari Kementerian PUPR yang datang terlambat (25 Maret 2019) • Harus melakukan review DED sehingga lelang fisik IPAL mundur • Paket fisik konstruksi rehab/rekon mundur karena lelang DED gagal
Deviasi Keuangan \geq 10 %	27,79%	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kegiatan terlambat karena UP yang terlambat dikarenakan kebijakan rekonsiliasi aset yang maju bulan Januari dari sebelumnya bulan Maret • Adanya sisa-sisa lelang sehingga menambah persentase deviasi keuangan

E. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang harus melalui tender sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 diinformasikan sebagai berikut :

Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2019 (yang harus melalui tender)	Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan (Rp) (yang harus melalui tender)	Realisasi Jumlah paket selesai tender sd Akhir Triwulan II/2019	Realisasi Paket yang selesai tender sd Akhir Triwulan II/2019 (dalam Rp)
329 paket	Rp282.374.976.570,00	82 paket	Rp80.842.482.250,00

Sampai dengan akhir TW II Tahun 2019 paket tender yang sudah terlaksana sejumlah 82 paket dari total 349 paket, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PENGADAAN	PAKET	PAGU
BARANG	11	7.922.629.000
KONSTRUKSI	58	69.942.198.250
KONSULTANSI	3	694.750.000
JASA LAINNYA	10	2.282.905.000
Jumlah	82	80.842.482.250

Sampai dengan triwulan II Tahun 2019 ini realisasi jenis pengadaan konstruksi masih sedikit, hal ini dikarenakan adanya Perpres No 16 Tahun 2018 dimana untuk peraturan lembaga LKPP tentang barang dan jasa sudah ada yaitu Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Namun untuk konstruksi diarahkan untuk ikut Peraturan Menteri PUPR (ditunggu sampai Februari 2019 belum muncul). Kemudian Bagian LPBJ sudah berkirin surat ke Kementrian PUPR. Muncul Surat Edaran No.14 Tahun 2019 namun ternyata hanya untuk lingkup Kementrian PUPR.

Apabila memakai Peraturan Menteri PU PR No. 7 PRT/M/2011 sudah tidak memungkinkan karena bertentangan dengan Perpres No.16 Tahun 2018. Pada 25 Maret 2019 muncul Peraturan Menteri PU PR No. 7/PRT/M/2019 sehingga pada April ini baru dimulai lelang.

F. Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan.

Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 di Kabupaten Bantul untuk melaksanakan 4 urusan yakni Kebudayaan, Tata Ruang, Pertanahan dan kelembagaan dengan total anggaran Rp23.063.913.400,00 terealisasi sebesar Rp4.204.931.491,00 (18,23%). Secara ringkas, uraian progres pelaksanaan kegiatan Keistimewaan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Urusan kebudayaan

Pagu urusan kebudayaan secara keseluruhan sebesar Rp13.178.192.400,00 dengan realisasi keuangan Rp3.386.428.491,00 (22,02%). Urusan kebudayaan di Kabupaten Bantul diantaranya untuk Program sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman; Program pelestarian cagar budaya dan warisan budaya serta program adat seni tradisi dan lembaga budaya. Beberapa kegiatan belum dilaksanakan. Adapun progress kegiatan adalah terlaksananya pentas event seni 26 grup dari 250 grup, pentaas penggiat seni 2 event dari 10 event, event upacara adat tradisi 2 event, merti dusun 3 kali dari 20 kali serta rapat koordinasi inventarisasi, identifikasi permasalahan tanah dengan desa.

2. Urusan Tata Ruang

Dana Keistimewaan urusan tata ruang di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Adapun total pagu urusan tata ruang pada Tahun 2019 ini sebesar Rp7.296.850.000,00 dengan realisasi keuangan Rp5.816.000,00 (0,08%).

Kegiatan untuk urusan tata ruang berupa :

- penyusunan dokumen perencanaan pada SRS Samas - Parangtritis yang berupa RTBL Kawasan Depok serta RTBL Kawasan Pusat Wisata, Parangtritis;
- penyusunan dokumen perencanaan SRS Kotagede berupa RTBL Kawasan Watu Gilang;
- penguatan tebing sungai Gajah Wong (Jagalan) belum masuk daftar lelang;
- pengadaan konstruksi/pembelian lansekap (belum masuk daftar lelang sampai saat ini).

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SRS Kotagede (RTBL Kawasan Watu Gilang); SRS Samas (RTBL kawasan Depok dan SRS Parangtritis (RTBL kawasan Parangtritis) dengan total Pagu Rp696.850.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0 (dari target triwulan 2 sebesar Rp696.850.000,-). Realisasi Fisik 10% dari target triwulan 2 sebesar 100%. Adapun progres sampai dengan triwulan 2 ini adalah :

RTBL Kawasan Depok, Parangtritis dan Watu gilang sudah tahap pembuktian (HPS 239.965.000 ; 263.549.000 dan 189.992.000). Adapun pelaksanaan mundur dikarenakan menunggu proses lelang selesai. Untuk kegiatan penguatan tebing sungai Gajah Wong(Jagalan) dan pengadaan konstruksi /pembelian Lansekap realisasi fisik direncanakan selesai pada bulan November. Adapun progres sd tw 2 ini adalah menunggu pengumuman lelang.

3. Urusan Pertanahan

Pagu anggaran untuk urusan pertanahan sebesar Rp2.108.971.000,00 terealisasi Rp812.687.000 (38,53%). Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan anggaran Rp 1.803.976.000,-, (terdaftarnya 500 bidang tanah kasultanan di BPN).
- Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Rp 132.995.000,-, (30 rekomendasi penggunaan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa). Target fisik sdh 73%.
- Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Rp 172.000.000,-(rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga sebanyak 5 permasalahan di desa Wonokromo, Selopamioro, Tirtosari, Poncosari dan Karangtengah).

4. Urusan kelembagaan

Pagu urusan kelembagaan sebesar Rp479.900.000,00 terealisasi sebesar Rp227.340.700,00 (47,37%). Danais urusan kelembagaan dilaksanakan untuk penataan bentuk kelembagaan asli dan implementasi budaya pemerintahan Kabupaten Bantul. Adapun output dari penataan bentuk kelembagaan asli di Kabupaten Bantul berupa:

- Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah Kab. Bantul
- Raperda mengenai desa/kalurahan
- Raperbub mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah
- Raperbub mengenai tugas dan fungsi mengenai desa
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul

Untuk kegiatan implementasi budaya pemerintahan output berupa :

- Peningkatan pemahaman ASN tentang budaya satriya
- Bimtek pendampingan agen perubahan
- Laporan monev implementasi budaya pemerintahan

Progres sampai triwulan II ini adalah

- tersusunnya 1 dok SK Pokja Penataan bentuk kelembagaan Asli Kabupaten Bantul;
- Ekspose/konsultasi publik raperda perubahan Perda no 12 Tahun 2016
- Ekspose/konsultasi publik Raperda Kalurahan

- Konsultasi ke Kemendagri terkait penyusunan perda
- Terlaksananya raker penyusunan draft peraturan bupati tentang SOTK/Tusi kalurahan
- Nota persetujuan DPRD Kab.Bantul terhadap Raperda Kalurahan
- Nota persetujuan DPRD Kab.Bantul terhadap Raperda Perubahan Perda 12 Tahun 2016
- Terbentuknya agen perubahan
- Bimtek pendampingan agen perubahan
- Studi komparasi implementasi budaya pemerintahan
- Rapat evaluasi implementasi budaya pemerintahan di Kab.Bantul

Adapun dari target triwulan II yang belum terealisasi adalah penyusunan SOTK Kalurahan belum bisa diselesaikan karena masih menunggu regulasi tentang BPD dari Propinsi; draft tusi dinas Kebudayaan, draft tusi dipertaru; draft tusi kecamatan.

G. Realisasi Bantuan Keuangan

Jumlah alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.441.000.000,00 (BKK) dan Rp260.000.000,00 (Bankeudes) dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Padat Karya Infrastruktur (Disnakertrans)

Bantuan Keuangan padat karya infrastruktur di Kabupaten Bantul digunakan untuk pembangunan talud dan cor blok jalan yang meliputi 26 lokasi dengan 17 desa yaitu desa Bangunjiwo, Gilangharjo, Caturharjo, Jatimulyo, Temuwuh, Selopamioro, Wukirsari, Pleret, Mulyodadi, Sumber Mulyo, Sido Mulyo, Kretek, Donotirto, Seloharjo, Srihardono, Srimulyo, dan desa Sabdodadi. Target per lokasi 52 orang dengan melibatkan warga miskin yang berasal dari basis data terpadu (BDT 390 orang dari 1035 orang), realisasi hingga saat ini sudah 80 persen dan keuangan 30 persen (sudah dilaksanakan selama 2 minggu dari rencana 3 minggu Atau 18 hari kerja). Pelaksanaan mundur karena lelang pertama gagal tender krn dari penyedia yg memenuhi persyaratan evaluasi pengadaan (syarat KAK pekerjaan OPD).

2. Fasilitasi dan jejaring Ekonomi bagi keluarga Fakir Miskin (Dinas Sosial P3A)

Fasilitasi dan jejaring Ekonomi bagi keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH Graduasi dengan pagu sebesar Rp495.000.000,00 (165 KPM x Rp3.000.000,00) yang meliputi Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pajangan dan Srandakan (tiga kecamatan awal arahan dari Propinsi). Adapun detail dari 165 KPM sebagai berikut:

- 165 KPM sudah terverifikasi masuk BDT, PKH Graduasi, sudah disesuaikan dengan juklak juknis yang tahun 2018
- Progress 165 sudah diusulkan ke propinsi melalui SK Kepala Dinas, rekrutmen pendamping Graduasi dari pendamping PKH sudah (1 pendamping 15 KPM), bimtek pendamping, tgl 15, 16, 18 April 2019 bimtek untuk calon penerima dan penunjukan pendampingan.

3. Jambanisasi (Dinas Kesehatan)

Pembangunan Jamban (296 penerima) dengan pagu sebesar Rp592.000.000,00. Juknis keluar minggu pertama bulan April 2019 dari Dinkes DIY, setelah Juknis turun sudah menghubungi sanitarian untuk kelengkapan berkas pencairan, hingga saat ini masih menunggu sosialisasi dari kecamatan dan dinkes kab. Bantul. Dari 296 penerima sudah sesuai dengan SK Gubernur yang sudah keluar bulan Maret 2019 dan sudah sesuai dengan data BDT Imogiri. Dari 35 peserta yang tidak tercover di 2018 (Kecamatan Dlingo) belum bisa tercover di 2019 karena beda wilayah (saat ini jatahnya di Kecamatan Imogiri). Rencananya yang 35 itu akan di usulkan semua di tahun 2020 (jatah lokasi 2020 di Kecamatan Dlingo, Sedayu, dan Pandak). Progres saat ini sedang tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pengumpulan berkas untuk pengajuan. Sosialisasi kerjasama dengan kecamatan selama 5 kali.

4. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Bawuran

Pemkab Bantul mendapatkan bantuan keuangan kepada desa Bawuran Pleret, berupa kompensasi lingkungan sekitar TPA sebesar Rp66.250.000,00. Adapun bantuan akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan (cor blok) dusun Jambon sepanjang 290 meter x 2,8 meter x 0,1 meter. Adapun saat ini pelaksanaan sudah sampai dropping material.

5. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Sitimulyo

Pemkab Bantul mendapatkan bantuan keuangan kepada desa Desa Sitimulyo, berupa kompensasi lingkungan sekitar TPA sebesar Rp193.750.000,00. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan adalah untuk rabat beton, talud jalan dan talud lapangan dan dengan melalui mekanisme gotong-royong masyarakat. Lokasi adadi pedukuhan Ngablak dan Banyak 3. Progres saat ini masih menunggu sosialisasi DIY/DLHK.

H. Program Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 13,43%, selanjutnya sesuai dengan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 untuk tahun 2019 diharapkan angka kemiskinannya menjadi 10,86%. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2019 ini meliputi:

1. Skema Jaminan Perlindungan Sosial

No	Kegiatan	Jumlah Sasaran	Pelaksanaan	OPD
1	PKH*	65.000	Tahap pencairan : I : 64.613 = 34.030.500.000; II : 63.926 = 33.586.000.000;	Dinas Sosial
2	Pangan (BPNT)* bantuan	93.960	Yang bisa dicairkan 81.630	Dinas Sosial

No	Kegiatan	Jumlah Sasaran	Pelaksanaan	OPD
	pangan non tunai (pengganti raskin)		KPM	
3	PBI (Program Bantuan Iuran)	62.841	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan (12 x Rp 25000,- x 62.841)	Dinas Kesehatan
4	PBI APBN	503.365	Pencairan 503.365	BPJS

2. Skema Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Kegiatan	Jumlah Sasaran	Pelaksanaan	OPD
1	RTLH	212	Tahap verifikasi ulang, pencairan TW III	Dinas Sosial
		200	Sampai dengan TW II: 1. Verifikasi 2. Penyusunan SK Penerima 3. Sosialisasi kepada calon penerima 4. Pembuata RAB 5. PKS dengan Bank Penyalur	Dinas PUPKP
		375	RTLH bersumber dari Desa : 20% : Pencairan 52 %: Verifikasi ulang 28% : Penyusunan regulasi	Desa
2	Boga Sehat	900	Pencairan sudah hampir 50 persen. dengan rincian : 900 PM x 22.500 x 4 bulan	Dinas Sosial

3. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

No	Kegiatan	Jumlah Sasaran	Pelaksanaan	OPD
1	Dana Bergulir (PEKM – Program Ekonomi Keluarga Miskin – warga miskin punya usaha dan membentuk kelompok)	970	Diberikan setiap 3 bulan sekali (pengajuan berdasarkan proposal), sampai dengan saat ini sudah pencairan termin ketiga. Penyerapan sampai T.II : 108.000.000;	DPPKBPMD
2	Pemberdayaan WRSE	168	Proses Verifikasi ulang	Dinas Koperasi UKM
3	Padat Karya	193 titik	Sampai dengan TW II proses lelang material	Disnaker

No	Kegiatan	Jumlah Sasaran	Pelaksanaan	OPD
4	Pelatihan	256	Pelatihan 16 Paket, sampai dengan TW II Sudah terealisasi 9 Paket atau sebanyak 144 peserta	Disnaker

4. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk pengentasan kemiskinan :

Nama Perusahaan	Kegiatan	Keterangan	Nominal
KPPS BMT Artha Amanah Sanden	Bedah Rumah (RTLH)	3 rumah dengan biaya @5 juta	Rp 15.000.000
PT Madubaru	Bedah rumah (RTLH) di Kasihan	Renovasi 1 RTLH dengan biaya 10 juta	Rp 10.000.000
PT Cahaya Mulia Persada	Penerimaan 50 karyawan yang berasal dari Imogiri	Kriteria Minimal usia 18 tahun dan maksimal 30 tahun, Ijazah terakhir SMP	
Bank Panin Dubai Syariah	Beasiswa di SD N Petir	Direkomendasikan oleh Dikpora ke SD Petir dan Saansari. Saat ini dalam proses survey oleh bank.	Rp 2.000.000
BPD DIY Cabang Bantul	Beasiswa dan Infrastruktur	1. Beasiswa tingkat SMA/SMK 50 SISWA (@1,5juta) 2. Beasiswa tingkat univ di Bantul 50 mahasiswa @2,5juta) 3. Pembangunan warung di Mangunan (250 juta) 4. Sarpras pendidikan terdampak banjir di Bantul (200 juta)	
Bank Muamalat Indonesia	Beasiswa anak yatim dan bantuan korban bencana	Bantuan korban bencana sudah disalurkan ke BPBD 40 juta	Rp 40.000.000

5. Skema Supporting Lainnya

Untuk pembenahan pada aspek data, maka sudah dilakukan Musyawarah Desa (musdes) pada 75 desa tentang pelaksanaan validasi dan verifikasi data terpadu program penanganan fakir miskin, dalam rangka memverifikasi inklusion dan eksklusion error. Selain itu dilaksanakan program pemberian asupan makanan bagi lansia miskin dan penyandang disabilitas.

I. Catatan dan Rekomendasi :

Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut di atas, beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan yang sebesar 50,64% masih memiliki deviasi 6,99% dari target dan cenderung meningkat dari deviasi pada Triwulan I. Jika mempertimbangkan data jumlah kegiatan dengan deviasi fisik > 5% yang justru jumlahnya turun dari 21,56% kegiatan di Triwulan I menjadi hanya 4,29% kegiatan saja pada Triwulan II, maka di beberapa kegiatan deviasi yang terjadi disinyalir cukup besar. Beberapa penyebab merupakan faktor eksternal, seperti yang terkait revisi penambahan syarat di dokumen tender terkait K3 (terkait Permen PU 7/2019) untuk pekerjaan konstruksi yang menyebabkan pelaksanaan mundur dari tatakala semula. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bantul tetap perlu melakukan pengendalian internal, identifikasi secara lebih mendalam terhadap masing-masing hambatan pelaksanaan dengan mengoptimalkan sistem pelaporan dari seluruh OPD, sehingga dapat diberikan saran/rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan di triwulan selanjutnya. Secara khusus identifikasi ini juga untuk meyakinkan realisasi fisik yang dilaporkan jauh lebih tinggi dari realisasi keuangannya, sedangkan disinyalir masih ada cukup banyak kegiatan yang mundur dari tata kala yang dijadwalkan semula.
- 2) Realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul hingga akhir Triwulan II dilaporkan sebesar Rp298.765.332.433,51 atau 26,75% dari target anggaran kas. Deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang sebesar 19,99% juga meningkat tajam dari kondisi Triwulan I dengan angka deviasi 5,88%. Kondisi tersebut didukung fakta adanya peningkatan jumlah kegiatan dengan deviasi keuangan > 10%, dari sebanyak 4,38% kegiatan di Triwulan I, menjadi sejumlah 27,79% kegiatan pada Triwulan II. Untuk realisasi keuangan yang bersifat menyesuaikan kebutuhan, sisa pengadaan barang/jasa, dan upaya efisiensi yang telah dilakukan perlu mendapat apresiasi, namun untuk hal-hal yang bersifat keterlambatan/ketidak sesuaian dengan tata kala perlu menjadi perhatian khusus, seperti keterlambatan pembuatan SPJ kegiatan, keterlambatan karena adanya kesalahan dalam penempatan kode rekening, dan pelaksanaan kegiatan mundur dari tata kala, agar menjadi perhatian. Mempertimbangkan realisasi keuangan hingga akhir TW II yang masih tergolong rendah, akselerasi perlu ditingkatkan antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa kendala secara lebih mendalam, sehingga ada upaya terobosan untuk memastikan belanja pemerintah pada triwulan berikutnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memberikan dampak kepada perekonomian Kabupaten Bantul pada umumnya serta masyarakat pada khususnya.
- 3) Kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme tender sampai dengan akhir Triwulan II mencapai 82 paket dengan nilai Rp80.842.482.250,00. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket tender

yang dimiliki yakni 329 paket, maka Pemerintah Kabupaten Bantul masih memiliki pekerjaan rumah untuk penyelesaian tender sebanyak 247 paket. Mencermati hal tersebut, agar dilakukan percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap paket pekerjaan yang sudah dalam pelaksanaan fisik oleh penyedia barang/jasa, untuk memastikan kualitas hasil pengadaan tetap terjaga, karena kemunduran jadwal tentunya berpengaruh pada kecukupan waktu pelaksanaan di lapangan.

- 4) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mohon dapat dipastikan selaras dengan mandat keistimewaan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi harus dilakukan dengan cermat dan aktif melakukan koordinasi dengan pengampu kepentingan terkait. Secara umum realisasi pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan oleh KPA di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul hingga akhir Triwulan II masih belum optimal, sehingga perlu upaya percepatan dengan tetap memperhatikan tertib administrasi serta menjaga kualitas pelaksanaannya. Perlu diingatkan bahwa tata kelola keuangan dana keistimewaan pencairannya melalui mekanisme termin, saat ini dibutuhkan capaian realisasi minimal 80% untuk mengajukan termin berikutnya (Tahap II), oleh karenanya dimohon agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan segera diikuti dengan pertanggungjawaban keuangannya.
- 5) Bantuan keuangan dari Pemda DIY yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan mohon dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk teknis yang ada sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan bisa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemda DIY, maupun antar OPD teknis diharapkan pelaksanaan BKK dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Bantul dimohon juga memberikan pendampingan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan Pemda DIY kepada Pemerintah Desa yang menerima.
- 6) Target penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sebesar 10,86% jika mengacu pada RPJMD DIY 2017-2022. Memperhatikan realisasi angka kemiskinan tahun 2018 yang sebesar 13,43%, tentunya diperlukan upaya yang lebih baik dengan pola intervensi yang tepat sasaran. Oleh karenanya agar dipastikan peningkatan kualitas program/kegiatan yang didesain untuk menurunkan angka kemiskinan, baik yang bersumber dari APBN, BKK Pemda DIY maupun dari APBD Kabupaten, dana CSR maupun sumber-sumber lain yang bisa dipergunakan,

sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat secara nyata memberikan hasil yang maksimal.

- 7) Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II, secara umum masih diperlukan pengendalian yang lebih cermat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan refleksi terhadap progress pelaksanaan yang sudah dilakukan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 ini, antara lain dalam hal kinerja fisik dan keuangan, pelaksanaan tender barang/jasa, pelaksanaan dana keistimewaan, upaya pengurangan kemiskinan, serta target kinerja lainnya. Agar dipastikan bahwa upaya dalam mencapai target-target tersebut sudah berjalan dengan baik, melakukan koordinasi yang intensif dengan *stake holder*, dan merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Demikian disampaikan Laporan atas pelaksanaan pengendalian pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019. Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah Saudara lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan kami berharap kinerjanya dapat dioptimalkan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Juli 2019

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut disampaikan hasil pelaksanaan pengendalian pembangunan sebagai berikut:

A. APBD yang Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2019 mengelola APBD sebesar Rp2.271.327.162.263,85 dengan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.220.392.365.270,89 dan pagu Belanja Langsung sebesar Rp1.050.934.796.992,96 untuk melaksanakan 130 program 381 kegiatan yang tersebar pada 47 unit OPD.

B. Target dan Realisasi Fisik

Capaian kinerja fisik sampai dengan akhir Triwulan II disampaikan sebagai berikut:

Bulan	Fisik		Deviasi (%)	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi (Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi penyebab)
	Target (%)	Realisasi (%)		
s.d. 30 Juni 2019	38,49	22,90	15,59	<ul style="list-style-type: none"> • Ada perubahan dokumen perencanaan yang berakibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal. • Beberapa belanja modal belum terlaksana karena item barang belum tersedia dalam e-katalog. • Pedoman pengadaan Jasa Konstruksi baru terbit tanggal 20 Maret 2019 sehingga proses pengadaan baik itu tender dan non tender juga mundur dari jadwal. • Terjadi perubahan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui Penyedia menyesuaikan Permen PU Nomor 7 Tahun 2019. • Penyedia barang/ jasa belum siap dengan aplikasi SIKaP

B. Target dan Realisasi Keuangan

Target dan realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja disampaikan melalui tabel berikut:

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)				Deviasi (%)	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
s.d. 30 Juni 2019	Belanja Pegawai	18.661.119.500,00	40,50	12.556.703.823,00	27,25	13,25	<ul style="list-style-type: none"> - Honor GTT/PTT/THL/GTY/PTY/Guru Pegganti sampai bulan Juni baru terealisasi 50,54% karena adanya perubahan data penerima. - Penempatan anggaran kas tidak tepat sehingga mengakibatkan target triwulan 2 tidak sesuai realisasi. - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)				Deviasi (%)	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
							<p>dan Anggota DPRD belum dilaksanakan karena terhambat pileg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyusun Kisi-kisi, Honor Penyusun Soal UKK, UTS, Ulangan Harian, Tryout, Tes Pengendali Mutu, dsb tidak bisa direalisasikan karena adanya perubahan kebijakan penatausahaan keuangan.
	Belanja Barang dan Jasa	184.074.191.748,00	41,51	149.903.032.999,46	33,81	7,7	<ul style="list-style-type: none"> - Ada perubahan dokumen perencanaan yang berakibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal. - Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. - Penyedia barang/ jasa belum siap dengan aplikasi SIKaP
	Belanja Modal	133.563.823.790,00	23,79	26.504.634.267,07	4,72	19,07	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan dokumen perencanaan. - Beberapa belanja modal belum terlaksana karena item barang belum tersedia dalam e-katalog. - Pedoman pengadaan Jasa Konstruksi baru terbit tanggal 20 Maret 2019 sehingga proses pengadaan baik itu tender dan non tender juga mundur dari jadwal - Penyedia barang/ jasa belum siap dengan aplikasi SIKaP
	TOTAL	336.299.135.038,00	32,00	188.964.371.089,53	17,98	14,02	

C. Prosentase Kegiatan dengan deviasi Fisik \geq 5% dan deviasi Keuangan \geq 10%

Kriteria	% terhadap keseluruhan kegiatan	Faktor Penghambat
Deviasi keuangan \geq 10%	9,45%	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sebagian sudah dilaksanakan, dan SPJ masih dalam proses. • Adanya perubahan dokumen perencanaan. • Barang belum tersedia di e-katalog. • Pedoman pengadaan baru turun tanggal 20 Maret 2019.
Deviasi fisik \geq 5%	8,66%	<ul style="list-style-type: none"> • Ada perubahan dokumen perencanaan yang berakibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal. • Beberapa belanja modal belum terlaksana karena item barang belum tersedia dalam e-katalog. • Pedoman pengadaan Jasa Konstruksi baru terbit tanggal 20 Maret 2019 sehingga proses pengadaan baik itu tender dan non tender juga mundur dari jadwal. • Penyedia barang/ jasa belum siap dengan aplikasi SIKaP

D. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang harus melalui mekanisme tender sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2019 (Yang harus melalui tender)	Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan (Rp) (Yang harus melalui tender)	Realisasi jumlah paket selesai tender s.d. Akhir TW II/2019	Realisasi Paket yang selesai tender s.d. TW II/2019 (dalam Rp)
141 paket	Rp302.664.857.981,00	30 paket	Rp20.182.220.430,80

Jumlah paket tender tahun 2019 sebanyak 141 paket yang terdiri dari :

- Konstruksi : 70 paket
- Konsultansi : 28 paket
- Pengadaan barang : 39 paket
- Jasa Lainnya : 4 paket

Secara umum kendala/permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa hingga akhir Triwulan II masih terkait kemunduran jadwal tender terutama jasa konstruksi, karena menunggu diterbitkannya Permen PU yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagai turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, adanya perubahan dokumen Perencanaan (Perbup Mendahului Perubahan APBD), dan penataan kelembagaan dan pegawai pada Bagian Layanan Pengadaan.

E. Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019

Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul secara total sebesar Rp172.672.406.040,00 untuk melaksanakan 4 urusan yaitu Kebudayaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kelembagaan. Realisasi sampai dengan akhir triwulan II dari target fisik sebesar 47,98% terealisasi 36,52%. Sedangkan untuk kinerja keuangan, dari target sebesar Rp45.609.584.455,00 (26,41%) terealisasi sebesar Rp3.589.578.709,00 (2,08%). Secara ringkas, uraian progress pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan terdiri dari 5 (lima) program kegiatan, yaitu: i. Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman; ii. Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya; iii. Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni; iv. Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya; dan v. Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya. Dari pagu anggaran sebesar Rp65.826.174.340,00 capaian ditargetkan pada akhir triwulan II sebesar Rp42.032.735.455,00 (63,85 %) terealisasi Rp2.374.953.400,00 (3,61%) sedangkan target fisik 51,46% terealisasi 22,26%.

Berikut kendala yang dihadapi dan tindak lanjutnya:

- a. Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Kendala : Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan bersejarah Pemugaran Bangsal Sewoko Projo dan Situs Sokoliman senilai Rp1.198.250.000 akan dihitung kembali, RAB menyesuaikan rekomendasi dan kebutuhan (contoh pemugaran Bangsal Sewoko Projo genteng pres diubah menjadi genteng sirap dsb, pemugaran Situs Sokoliman memilah prioritas).

Tindak Lanjut : Sesuai dengan hasil koordinasi akan dilakukan penghitungan kembali RAB atas pemugaran Bangsal Sewoko Projo yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Adapun untuk situs Sokoliman yang rencananya dibiayai Rp 1 M menjadi 150 juta, sehingga perlu memilah prioritas pekerjaan sesuai dengan anggaran yang ada.

- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya

Kendala : Belanja Hibah Barang kepada Masyarakat berupa Gamelan Besi Kencon Kuningan kepada 7 Desa di Gunungkidul belum dilaksanakan karena adanya aturan dari LKPP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang jasa Pemerintah

Tindak Lanjut : Sesuai dengan hasil rapat koordinasi di Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 18 Juni 2019, pengadaan Gamelan dilaksanakan sesuai dengan LKPP No 12 Tahun 2018, tahap pengadaan akan dilaksanakan mulai dari

perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan melalui kompetensi oleh Pejabat Pengadaan. Akan segera dibentuk tim pengadaan berikut paparan pengadaan ke peserta pengadaan sesuai dengan aturan dalam LKPP No 12 Tahun 2018, dan hasil koordinasi.

- c. Program Pengelolaan Taman Budaya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya

Kendala : Pembangunan fisik Taman Budaya Tahap 2 secara Multi years, namun anggaran yang ditetapkan dianggarkan setiap tahun.

Tindak Lanjut : Penyelesaian pekerjaan pembangunan sesuai dengan anggaran setiap tahun sesuai dengan RAB per tahun.

2. Bidang Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; serta Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dari pagu anggaran sebesar Rp2.571.391.000,00 capaian ditargetkan pada akhir triwulan II sebesar Rp938.236.500,00 (36,49%) terealisasi Rp541.002.000,00 (21,04%). Sedangkan target fisik sebesar 36,47% tercapai 27,78%. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan II ini adalah:

- a. Pembentukan tim-tim paelaksanan diantaranya Tim Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan SK Kepala DPTR Kabupaten Gunungkidul
- b. Pengumpulan Berkas Pendaftaran tanah sebanyak 785 bidang
- c. Penelitian berkas perndaftaran tanah Kasultanan sebanyak 785 bidang
- d. Pembuatan dan Pemasangan 6447 patok batas tanah SG
- e. Mendorong percepatan pengurusan izin penggunaan tanah desa yang beralih fungsi ke non pertanian adalah dengan mengadakan:
 - Pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa secara rutin.
 - Melakukan FGD dan Bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam menyusun Perdes tentang Pemanfaatan Tanah Desa karena perdes merupakan syarat utama dalam mengurus izin. Sampai bulan Juni telah dilakukan FGD dan Bimbingan teknis kepada 6 (enam) desa di Kecamatan Wonosari

3. Bidang Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang terdiri dari 2 (dua) program, yaiatu : i. Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; dan ii. Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Dari pagu anggaran sebesar Rp103.774.840.700,00 capaian ditargetkan pada akhir triwulan II sebesar Rp2.451.550.000,00 (2,36%) terealisasi Rp489.200.000,00 (0,47%). Sedangkan target fisik sebesar 58,50% tercapai 58,50%.

Adapun kegiatan fisik yang telah dilakukan adalah:

- a. Penyusunan SK TIM Penjamin KLHS RDTRK Kecamatan Patuk, Penjamin KLHS RDTRK Siung – Wediombo, Pokja Jasa Konsultan Penyusunan KLHS RDTRK Kecamatan Patuk, Pokja PPHP
- b. Penyusunan KAK
- c. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
- d. Proses lelang

Sedangkan kendala yang dihadapi selain koordinasi di internal perangkat daerah adalah adanya sanggahan dari Masyarakat dari hasil Daftar Nominatif serta adanya tanah jalan Gang yang diklaim sebagai milik warga yang dimintakan ganti rugi. Dari kendala di atas diupayakan untuk melakukan identifikasi ulang oleh Tim Satgas.

4. Bidang Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan terdiri dari 2 (dua) program yaitu: Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Keistimewaan) serta Program Peningkatan Budaya Pemerintahan (Keistimewaan). Dari pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 capaian ditargetkan pada akhir triwulan II sebesar Rp187.062.500,00 (37,41%) terealisasi Rp184.423.309,00 (36,88%). Sedangkan target fisik sebesar 45,50% tercapai 37,56%. Untuk program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sampai dengan akhir bulan Juni 2019, draf Raperda tentang Perubahan Perda 7 Tahun 2016 dan draf Raperda tentang Kalurahan sudah berhasil diselesaikan. Pada saat ini 2 (dua) regulasi tersebut sudah diproses oleh Bagian Hukum dan sudah mendapatkan rekomendasi hasil konsultasi dari Pemda DIY serta sudah masuk tahap jawaban Bupati atas Pertanyaan dari DPRD Kabupaten Gunungkidul, dimana diagendakan akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2019. Demikian juga dengan Raperbup tentang Tugas dan Fungsi Kalurahan sudah berhasil disusun drafnya.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah karena pelaksanaan kegiatan danais dengan sistem BKK di Kabupaten Gunungkidul baru pada tahun pertama sehingga masih ditemukan beberapa perubahan dalam sistem pengelolaannya maupun administrasi keuangannya yang menyebabkan kebingungan bagi pelaksana langsung kegiatan. Sedangkan untuk Program Peningkatan Budaya Pemerintahan telah terlaksana kegiatan:

- a. Rapat Koordinasi Rutin Pokja Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. Penggandaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018;
- c. Penyusunan Action Plan implementasi budaya pemerintahan; dan
- d. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 kepada 100 orang Kepala Desa.

Dari pelaksanaan Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul, masih dijumpai beberapa kendala:

- a. Action Plan implementasi budaya pemerintahan belum semua Perangkat Daerah dapat menyelesaikan;
- b. Mutasi Pejabat tidak serta merta diikuti dengan perubahan komposisi keanggotaan Kelompok Budaya Pemerintahan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

F. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.032.000.000,00 dengan penjelasan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Modal Usaha Untuk UEP PKH

Program bantuan keuangan ini merupakan program lanjutan dari kegiatan tahun 2018. Program ini diberikan kepada peserta KPM PKH pasca graduasi yang sudah tidak lagi memiliki komponen sebagai peserta PKH dan masih memerlukan bantuan dari pemerintah. Pemberian bantuan berupa modal usaha untuk pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif di luar usaha bidang peternakan. Target usulan penerima tahun 2019 sebanyak 180 orang peserta yang tersebar di 3 kecamatan. Masing-masing lokasi adalah 60 orang. Pagu anggaran sebesar Rp540.000.000,00 dan setiap peserta mendapatkan bantuan sebesar Rp3.000.000,00. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah 180 peserta telah mengikuti assesmet, seleksi, dan bimbingan teknis ketrampilan berusaha di masing-masing wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan Para Pendamping PKH yang telah mengikuti Bimbingan teknis. Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan serapan keuangan masih 0% (nol persen). Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- a) Melaksanakan rapat koordinasi baik ditingkat Propinsi DIY, Kabupaten Gunungkidul dan Kecamatan untuk menentukan arah dan rencana kegiatan
- b) Melakukan verifikasi data graduasi PKH 2019 bersama Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten dan Pendamping PKH.
- c) Sosialisasi dan assessment kepada calon penerima bantuan/program di 3 (tiga) Kecamatan (Playen, Nglipar, Semin) pada tanggal 13 Februari 2019.
- d) Seleksi calon penerima bantuan/program
- e) Penetapan penerima bantuan/program
- f) Bimtek pendamping penerima bantuan/program
- g) Membuat jadwal bimbingan motivasi berusaha di 3 (tiga) Kecamatan.
 - a) Kecamatan Semin tanggal : 8 April 2019 di Desa Semin
 - b) Kecamatan Nglipar tanggal : 9 April 2019 di Desa Natah
 - c) Kecamatan Playen tanggal : 10 April 2019 di Desa Ngunut

- h) Telah dilaksanakan bimbingan teknis/ bimbingan motivasi berusaha bagi KPM PKH Graduasi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dengan lokasi berada di Balai Desa.
- i) Sudah dilaksanakan Pembukaan Rekening Bank (BPD DIY) atas nama KPM PKH Graduasi.
- j) Sedang dibuatkan SK Gubernur tentang penetapan KPM penerima program sebagai dasar pencairan bantuan.

Proses penyaluran bantuan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti, namun potensi permasalahan dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program kegiatan ini adalah :

- a) Sikap, mental, budaya konsumtif yang kurang mendukung dan lemahnya motifasi usaha peserta program kegiatan.
- b) Minimnya ketrampilan usaha yang dapat dikembangkan diluar peternakan dan pertanian.
- c) Lemahnya kemampuan SDM untuk bersaing secara sehat dengan usaha orang lain.
- d) Lemahnya kemampuan untuk memasarkan hasil usahanya.

2. Pembangunan Jamban

Program bantuan keuangan jambanisasi merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya. Sasaran bantuan ini untuk masyarakat/kepala keluarga miskin yang belum mempunyai jamban sehat dan sudah ada akses air bersih khususnya di wilayah Kecamatan Gedangsari dengan jumlah sasaran 184 kepala keluarga. Skema bantuan diberikan kepada sasaran penerima sebagai stimulant dalam bentuk bantuan sosial uang. Total pagu anggaran adalah Rp460.000.000,00. Bantuan sejumlah Rp2.500.000,00 diberikan ke setiap keluarga penerima. Sampai dengan triwulan II ini progres pelaksanaan kegiatan sudah pada tahap verifikasi data penerima dilapangan. Kendala yang dihadapi adalah setelah dilakukan verifikasi data di Dinas Dukcapil calon penerima bantuan BKK di wilayah Kecamatan Gedangsari, ternyata ada perbedaan data, ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal dan ada perbedaan NIK dengan alamat yang dimaksud, maka untuk tahap selanjutnya dilakukan verifikasi data dilapangan bekerja sama dengan perangkat desa dan kecamatan

3. Padat Karya Infrastruktur

Kegiatan padat karya infrastruktur merupakan program lanjutan tahun sebelumnya. Kegiatan padat karya infrastruktur berupa kegiatan cor blok jalan yang dilaksanakan di 8 lokasi. Pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.032.000.000,00. Kegiatan padat karya ini untuk tiap-tiap lokasi melibatkan 52 tenaga kerja yang terdiri dari 2 orang kepala kelompok, 10 orang tukang dan pekerja sebanyak 40 orang. Sedangkan

pelaksanaanya masing-masing minimal selama 18 hari (sesuai juknis). Rincian lokasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Dusun Bonpon, Pundungsari, Kecamatan Semin
- b) Dusun Ngepoh, Semin, Kecamatan Semin
- c) Dusun Munggur, Ngipak, Karangmojo
- d) Dusun Kenteng, Kenteng, Kecamatan Ponjong
- e) Dusun Turi, Sidorejo, Kecamatan Ponjong
- f) Dusun Wareng, Kepek, Kecamatan Saptosari
- g) Dusun Gemisir, Kemadang, Kecamatan Tanjungsari
- h) Dusun Baran, Salam, Kecamatan Patuk

Sampai dengan akhir triwulan II progres penyerapan keuangan masih 0% (nol persen) sehubungan kegiatan fisik baru pada tahap persiapan pengadaan bahan.

G. Program Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sebesar 17,12% atau sejumlah 125,76 ribu jiwa. Target angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 ditetapkan sebesar 14,30% atau menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,82%. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2019 ini meliputi:

NO	Program	Kegiatan	Anggaran 2019	Realisasi s.d. TW II		Penanggung Jawab Utama
				Rp.	%	
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	2,375,497,000	414,500,800	17.45	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Institusional	409,880,000	41,817,000	10.20	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
	Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Kewirausaha Pemuda	Pembinaan Generasi Muda	1,188,188,300	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	Perbaikan Gizi Masyarakat	Pencegahan dan Penaggulangan Masalah Gizi	1,634,639,400	76,605,000	4.69	Dinas Kesehatan
		Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	91,420,000	22,290,000	24.38	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	134,040,320	7,960,000	5.94	Dinas Kesehatan

NO	Program	Kegiatan	Anggaran 2019	Realisasi s.d. TW II		Penanggung Jawab Utama
				Rp.	%	
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	34,254,038,000	15,332,286,829	44.76	Dinas Kesehatan
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	589,635,500	67,146,770	11.39	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	677,882,500	110,750,000	16.34	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Lingkungan Sehat	946,745,000	221,033,500	23.35	Dinas Kesehatan
3	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS	1,343,565,000	85,831,998	6.39	Dinas Sosial
		Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,221,972,000	258,500,000	21.15	Dinas Sosial
	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial	971,468,750	226,209,000	23.29	Dinas Sosial
		Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarustamaan Disabilitas	666,407,000	378,983,061	56.87	Dinas Sosial
4	Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	324,825,000	69,235,000	21.31	Dinas P3AKBPMD
	Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pembinaan Lembaga Ekonomi Perdesaan	252,605,000	57,675,900	22.83	Dinas P3AKBPMD
5	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penanganan Kawasan Kumuh	861,040,000	4,504,100	0.52	Dinas PUPRKP
		Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya	229,880,000	8,116,500	3.53	Dinas PUPRKP
	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air limbah	15,758,204,000	110,132,400	0.70	Dinas PUPRKP

NO	Program	Kegiatan	Anggaran 2019	Realisasi s.d. TW II		Penanggung Jawab Utama	
				Rp.	%		
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan	282,255,000	98,000,000	34.72	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Peningkatan Kualitas Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	239,547,500	130,477,500	54.47	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian	385,575,000	112,290,000	29.12	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	1,313,017,000	124,916,000	9.51	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Peningkatan Produksi Perkebunan dan Holtikultura	Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan	375,245,000	170,673,000	45.48	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pembinaan Budidaya Tanaman Holtikultura	282,294,000	117,068,276	41.47	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Peningkatan Agribisnis Pertanian	Pembinaan Mutu Hasil Pertanian	71,800,000	45,400,000	63.23	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Peningkatan Produksi Peternakan	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	262,540,000	125,780,000	47.91	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pembinaan Budidaya Ternak	441,454,000	150,009,160	33.98	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pembinaan Perbibitan Ternak	228,263,000	13,815,000	6.05	Dinas Pertanian dan Pangan	
	7	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Pembinaan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	335,972,500	89,874,600	26.75	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Budidaya Ikan	497,382,500	143,173,500	28.79	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberdayaan Nelayan		Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Perikanan	180,510,000	55,276,000	30.62	Dinas Kelautan dan Perikanan	

NO	Program	Kegiatan	Anggaran 2019	Realisasi s.d. TW II		Penanggung Jawab Utama
				Rp.	%	
		Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	98,355,000	48,140,000	48.95	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan Pencari Kerja	611,705,000	346,021,000	56.57	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan	27,315,000	1,950,000	7.14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata	1,905,250,000	463,593,115	24.33	Dinas Pariwisata
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata	402,196,250	150,601,250	37.44	Dinas Pariwisata
	Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	759,130,000	198,256,350	26.12	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Industri Pariwisata	1,085,205,000	80,827,000	7.45	Dinas Pariwisata
10	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pembinaan dan Pendampingan Industri Makanan Minuman dan Kimia	754,813,900	371,223,500	49.18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka	469,504,000	200,990,385	42.81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	334,900,000	89,041,200	26.59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM	Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM	504,550,000	179,390,000	35.55	Dinas Koperasi dan UKM
		Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM	515,282,500	106,430,000	20.65	Dinas Koperasi dan UKM
12	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan	177,405,000	22,702,500	12.80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Program	Kegiatan	Anggaran 2019	Realisasi s.d. TW II		Penanggung Jawab Utama
				Rp.	%	
		Masyarakat				
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah	99,480,000	18,805,300	18.90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

H. Catatan dan Rekomendasi :

Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut di atas, beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan mendatang adalah sebagai berikut :

1. Realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan yang sebesar 22,90% memiliki deviasi 15,59% dari target dan cenderung meningkat dari deviasi pada Triwulan I. Kondisi tersebut didukung data adanya peningkatan jumlah kegiatan dengan deviasi fisik >5% dari 4,46% kegiatan di Triwulan I menjadi 8,66% kegiatan pada Triwulan II. Penyebab deviasi diantaranya karena mundurnya jadwal pekerjaan fisik di lapangan karena pengadaan barang/jasa yang terkendala e katalog, pedoman pengadaan Jasa Konstruksi baru terbit tanggal 20 Maret 2019 sehingga proses pengadaan baik itu tender dan non tender juga mundur dari jadwal, terjadi perubahan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui Penyedia menyesuaikan Permen PU Nomor 7 Tahun 2019, dan penyedia barang/ jasa belum siap dengan aplikasi SIKaP. Namun ada juga yang terindikasi karena faktor internal berupa perubahan dokumen perencanaan yang berakibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan identifikasi secara lebih mendalam terhadap masing-masing hambatan pelaksanaan dengan mengoptimalkan sistem pelaporan dari seluruh OPD, sehingga dapat diberikan saran/rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan di triwulan selanjutnya. Apalagi jika mempertimbangkan realisasi fisik hingga tengah tahun anggaran yang masih cukup rendah.
2. Realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hingga akhir Triwulan II dilaporkan sebesar Rp188.964.371.089,53 atau 17,98% dari target anggaran kas. Deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang sebesar 14,02% juga meningkat tajam dari kondisi Triwulan I dengan angka deviasi 4,43%. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan adanya peningkatan jumlah kegiatan dengan deviasi keuangan > 10%, dari sebanyak 5,25% kegiatan di Triwulan I, menjadi sejumlah 9,45% kegiatan pada Triwulan II. Secara umum untuk realisasi keuangan yang bersifat menyesuaikan kebutuhan, sisa pengadaan barang/jasa, dan upaya efisiensi yang telah dilakukan perlu mendapat apresiasi, namun untuk hal-hal yang bersifat keterlambatan/ketidaksesuaian dengan tata kala perlu menjadi perhatian khusus. Mempertimbangkan realisasi keuangan hingga akhir TW II yang masih belum optimal, akselerasi perlu

ditingkatkan antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa kendala secara lebih mendalam, sehingga ada upaya terobosan untuk memastikan belanja pemerintah pada triwulan berikutnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memberikan dampak kepada perekonomian Kabupaten Gunungkidul pada umumnya serta masyarakat pada khususnya.

3. Kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme tender sampai dengan akhir Triwulan II mencapai 30 paket dengan nilai Rp20.182.220.430,80. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket tender yang dimiliki yakni 141 paket, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki pekerjaan rumah untuk penyelesaian tender sebanyak 111 paket (sebagian diantaranya merupakan pekerjaan konstruksi). Mencermati hal tersebut, agar dilakukan percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, serta melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang sudah dalam pelaksanaan fisik oleh penyedia barang/jasa, untuk memastikan kualitas hasil pengadaan tetap terjaga, karena kemunduran jadwal tentunya berpengaruh pada kecukupan waktu pelaksanaan di lapangan.
4. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mohon dapat dipastikan selaras dengan mandat keistimewaan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi harus dilakukan dengan cermat dan aktif melakukan koordinasi dengan pengampu kepentingan terkait. Secara umum realisasi pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan oleh KPA di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pemegang Anggaran (PA) memiliki kewenangan otonom dalam hal pengelolaan dana keistimewaan yang dialokasikan Pemda DIY melalui mekanisme BKK, sehingga pengendalian pelaksanaan dana keistimewaan sebaiknya juga dilakukan secara lebih intensif, mengingat pelaksanaan selama triwulan II masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitas capaiannya. Termasuk didalamnya tertib administrasi dan jadwal yang sudah disusun sebelumnya, mengingat tata kelola keuangan dana keistimewaan pencairannya melalui mekanisme termin. Saat ini dibutuhkan capaian realisasi minimal 80% untuk mengajukan termin berikutnya (Tahap II), oleh karenanya dimohon agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan segera diikuti dengan pertanggungjawaban keuangannya.
5. Bantuan keuangan dari Pemda DIY yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan mohon dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk teknis yang ada sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan bisa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemda DIY

dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun antar OPD teknis diharapkan pelaksanaan BKK dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya.

6. Target penurunan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 cukup tinggi yakni 14,3% sedangkan capaian tahun 2018 sebesar 17,12%. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang memiliki upaya menurunkan kemiskinan. Pengendalian dan evaluasi sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan, sehingga output yang dihasilkan memberikan dampak penurunan secara signifikan, mengingat tingkat kemiskinan di Gunungkidul masih termasuk tinggi. Pelaksanaan BKK untuk penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar memiliki manfaat bagi pengguna, termasuk halnya dalam upaya mengidentifikasi peran CSR yang diharapkan juga mendorong upaya menurunkan kemiskinan sebagai energi tambahan yang membantu Pemerintah Daerah.

7. Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II, secara umum masih diperlukan pengendalian yang lebih cermat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan refleksi terhadap progress pelaksanaan yang sudah dilakukan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 ini, antara lain dalam hal kinerja fisik dan keuangan, pelaksanaan tender barang/jasa, pelaksanaan dana keistimewaan, upaya pengurangan kemiskinan, serta target kinerja lainnya. Agar dipastikan bahwa upaya dalam mencapai target-target tersebut sudah berjalan dengan baik, melakukan koordinasi yang intensif dengan *stake holder*, dan merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Demikian disampaikan Laporan atas pelaksanaan pengendalian pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2019. Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah Saudara lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan kami berharap kinerjanya dapat dioptimalkan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Juli 2019

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut disampaikan hasil pelaksanaan pengendalian pembangunan sebagai berikut:

A. APBD yang Ditetapkan

Pemerintah Kota Yogyakarta, pada Tahun Anggaran 2019 mengelola APBD sebesar Rp1.858.729.030.197,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 771.296.856.511,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.087.432.173.686,00 untuk melaksanakan 267 program (120 program eksternal dan 147 program internal) dengan jumlah kegiatan sebesar 674 yang terdistribusi pada 51 OPD/unit kerja.

B. Target dan Realisasi Fisik

Target dan realisasi fisik sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 diinformasikan melalui tabel berikut :

Bulan	Fisik		Deviasi (%)	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi (Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi penyebab)
	Target (%)	Realisasi (%)		
s.d. 30 Juni 2019	49,26	44,61	4,65	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan bersifat rutin dan penyediaan yang realisasinya menyesuaikan kebutuhan • Beberapa perangkat daerah mengklaim realisasi fisik berdasarkan realisasi keuangan • Adanya revisi penambahan syarat di dokumen tender terkait K3 (terkait Permen PU 7/2019) untuk pekerjaan konstruksi sehingga mundur dari tatakala semula • Beberapa OPD menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan (dana kelurahan)

C. Target dan Realisasi Keuangan

Target dan realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing jenis belanja disajikan berikut :

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)				Deviasi	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi*(Rp)	Realisasi* (%)		
s.d. 30 Juni 2019	Belanja Pegawai	81.936.956.455	53,90	56.940.329.078,16	37,46	16,44	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan proses pencairan honorarium pelaksana kegiatan • Pembayaran jasa pelayanan kesehatan menyesuaikan pendapatan
	Belanja Barang dan Jasa	321.560.714.746	51,36	195.193.555.261,82	12,66	31,18	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan pengSPJan • Realisasi keuangan kegiatan bersifat rutin dan adang-adang menyesuaikan kebutuhan • Belanja narasumber menyesuaikan kehadiran • Efisiensi belanja perjalanan dinas DPRD

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)				Deviasi	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi*(Rp)	Realisasi* (%)		
							<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian SHBJ
	Belanja Modal	112.949.713.499	36,51	25.961.796.380,09	8.39	28,12	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan mundur dari tata kala, • Penyedia jasa belum mengajukan uang muka • Untuk beberapa belanja modal baru mengSPJkan biaya penunjangnya • Adanya revisi penambahan syarat di dokumen tender terkait K3 (terkait Permen PU 7/2019) untuk pekerjaan konstruksi sehingga mundur dari tatakala semula
	TOTAL	516.447.384.700	47,49	278.095.680.720,07	25,57	21,92	

C. Prosentase Kegiatan dengan deviasi antara rencana dengan realisasi fisik > 5%, keuangan ≥ 10%

Kriteria	% terhadap keseluruhan kegiatan	Faktor Penghambat
Deviasi Fisik > 5%	24,04% (162 dari 674 kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan bersifat rutin dan adang-adang menyesuaikan kebutuhan • Beberapa perangkat daerah mengklaim realisasi fisik berdasarkan realisasi keuangan • Adanya revisi penambahan syarat di dokumen tender terkait K3 untuk pekerjaan konstruksi sehingga mundur dari tatakala semula • Beberapa OPD menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan (dana kelurahan)
Deviasi Keuangan > 10%	81,30% (548 dari 674 kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan proses pencairan honorarium pelaksana kegiatan • Pembayaran jasa pelayanan kesehatan menyesuaikan pendapatan • Keterlambatan pengSPJan • Realisasi keuangan kegiatan bersifat rutin dan adang-adang menyesuaikan kebutuhan • Belanja narasumber menyesuaikan kehadiran • Efisiensi belanja perjalanan dinas DPRD • Penyesuaian SHBJ,

Kriteria	% terhadap keseluruhan kegiatan	Faktor Penghambat
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan mundur dari tata kala, • Penyedia jasa belum mengajukan uang muka • Untuk beberapa belanja modal baru mengSPJkan biaya penunjangnya • Adanya revisi penambahan syarat di dokumen lelang terkait K3 untuk pekerjaan konstruksi sehingga terjadi kemunduran pelaksanaan pekerjaan.

D. Realisasi Tender Barang/Jasa

Kinerja Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui tender pada Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan akhir triwulan II Tahun Anggaran 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Jumlah Seluruh Paket Pengadaan Tahun 2019 (Yang harus melalui tender)	Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan(Rp) (Yang harus melalui tender)	Realisasi jumlah paket selesai tender s.d. akhir Triwulan II/2019	Realisasi Paket yang selesai tender s.d. akhir Triwulan II Tahun 2019 (dalam Rp)
159 paket	Rp223.513.418.817,00	65 paket	Rp86.749.850.886,00

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki 159 paket pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan melalui tender. Paket pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan TW II Tahun 2019 sebanyak 65 paket (dari target 135 paket), dengan rincian 21 paket jasa lainnya, 22 pekerjaan konstruksi, 11 pengadaan barang dan 11 Jasa Konsultansi. Adapun nilai kontrak tender yang selesai pada TW II sebesar Rp86.749.850.886,00 dari nilai HPS yang disusun sebesar Rp102.052.839.819,00. Terhadap target TW II, terdapat sisa paket yang belum selesai sebanyak 73 paket dengan rincian 11 paket dalam antrian, 45 paket dalam proses, dan 17 paket dalam proses revidi dokumen.

E. Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 di Kota Yogyakarta sebesar Rp53.899.168.884,00 untuk melaksanakan 4 urusan yakni Pertanahan, Tata Ruang, Kelembagaan dan Kebudayaan. Secara total realisasi fisik sampai dengan triwulan II sebesar 46,10% dari target yang sebesar 43,57%. Adapun dari sisi keuangan realisasinya sebesar Rp2.330.855.117,00 atau sebesar 15,10% dari target yang sebesar Rp15.435.178.075,00. Uraian progres pelaksanaan kegiatan keistimewaan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah diampu oleh Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dengan pagu sebesar Rp448.050.000,00. Pelaksana alokasi Dana

Keistimewaan urusan kelembagaan adalah Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, melalui 2 program, yaitu (1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Kegiatan Penataan bentuk kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta. Keluaran dari kegiatan ini adalah Raperda mengenai kelembagaan PD Kota dan Raperwal mengenai tugas fungsi Perangkat Daerah; (2) Program Peningkatan Budaya Pemerintahan dengan Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta. *Output* dari kegiatan ini adalah (1) Rencana Aksi (*action plan*) tentang budaya pemerintahan (2) Laporan monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan (3) Agen perubahan (kelompok budaya pemerintahan) yang mampu menjalankan fungsinya. Realisasi fisik sampai Triwulan II sebesar 53,08% dari target sebesar 53,08%, sementara realisasi keuangannya Rp174.431.250,00 atau sebesar 75,74% dari target Rp230.310.000,00.

2. Urusan Tata Ruang

2.1. Dinas Pariwisata melalui UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro

UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro melaksanakan Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan pagu sebesar Rp 4.235.111.609,00 dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi. Keluaran kegiatan ini adalah Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro sepanjang 1,5 Km secara baik selama 12 bulan dan 1 Dokumen Kesepakatan Bersama Penataan PKL Sisi Selatan Kawasan Malioboro Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan para pelaku pedagang kaki lima terkait perencanaan penataan Kawasan Malioboro. Realisasi fisik Triwulan II sebesar 46% dari target 46%. Sementara realisasi keuangannya sebesar Rp591.109.434,00 atau 25,44% dari target Rp2.323.115.500,00.

2.2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mengampu Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan pagu sebesar Rp34.251.823.750,00. Program ini memiliki 3 kegiatan, yaitu:

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis, dengan dua output, yaitu (1) Penataan sirip-sirip Malioboro di Jalan Suryatmajan sepanjang 390 m dan Jalan Pajeksan sepanjang 350 m; dan (2) Penggantian perkerasan jalan 2 sirip (Suryatmajan dan Pajeksan);
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru dengan keluaran Penataan kawasan Kotabaru Jalan Sudirman berupa (1) Penataan Pedestrian sepanjang 900m; dan (2) Pemasangan PJU di 30 titik.
- (3) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede berupa Penataan SAH Kawasan Kotagede / Jln. Mondorakan sepanjang 717m.

Realisasi fisik pelaksanaan sampai dengan Triwulan II yakni berupa reviu perencanaan dengan prosentase sebesar 0,25% dari target 0,25% dan realisasi

keuangannya sebesar Rp142.499.100,00 atau 2,05% dari target yang sebesar Rp6.962.649.600,00.

3. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan dana keistimewaan Urusan Kebudayaan diampu oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan pagu sebesar Rp14.014.788.525,00. Realisasi fisik sampai Triwulan II mencapai 38,20% dari target sebesar 37,56% dan realisasi keuangannya sebesar Rp1.045.388.033,00 atau 20,34% dari target triwulan II. Pelaksanaan dilakukan melalui tiga program, yaitu: (1) Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman; (2) Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya; dan (3) Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya. Sampai dengan triwulan II Tahun 2019 telah dilaksanakan Lomba Cerdas Cermat Permuseuman, Forum Kapasitas Sumber Daya Museum, Pembinaan Lembaga Adat dan Tradisi di Kota Yogyakarta, Pelatihan Bagi Rintisan Kelurahan Budaya dan lain-lain.

4. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan pagu sebesar Rp949.395.000,00 untuk alokasi dua program yaitu:

(1) Program Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kegiatan program ini adalah Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan 4 (empat) keluaran:

- Terdaftarkannya 75 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional;
- Dokumen hasil identifikasi 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di kota yogyakarta;
- Pemasangan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 120 papan nama;
- Terdaftarkannya 50 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional.

(2) Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Kegiatan program ini adalah Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan 2 (dua) keluaran:

- (1) Terlaksananya Sosialisasi Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 2 kali;
- (2) Terbitnya 300 Rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Realisasi fisik sampai dengan Triwulan II mencapai 70% dari target sebesar 60,50%, sedangkan serapan keuangannya sebesar Rp377.427.300,00 atau 48,48%

dari target yang sebesar Rp778.541.000,00. Sampai dengan akhir bulan Juni 2019, untuk Program Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, telah terdaftar 75 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional dan Pemasangan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 120 papan nama. Untuk Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah terbit rekomendasi penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten sejumlah 298 rekomendasi.

F. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta

Bantuan Keuangan dari Pemda DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.236.000.000,00. Adapun penjelasan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan II adalah sebagai berikut:

a. BKK Modal Usaha UEP PKH dengan pagu anggaran Rp450.000.000,00

Instansi Pelaksana: Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Peruntukan : Pada bulan Februari-Maret telah dilakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh pendamping PKH dari 150 penerima manfaat yang menghadiri bimbingan teknis sebanyak 115 penerima manfaat. Penyebab berkurangnya penerima manfaat diantaranya Untuk pencairan dana terhadap 115 penerima dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis bertahap selama 2 hari. Untuk penerima manfaat yang telah tervalidasi jika tidak hadir dalam bimbingan teknis tersebut dianggap gugur.

Progress : Sampai dengan akhir Juni sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial DIY terkait pergantian penerima manfaat dan masih menunggu SK Gubernur berdasarkan BNBA yang telah dikirimkan sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Faktor Penghambat : Penambahan 35 penerima manfaat untuk memenuhi kuota mengakibatkan adanya perubahan SK Walikota, sedangkan perubahan SK penerima bansos hanya bisa dilakukan pada APBD perubahan

b. BKK Padat Karya Infrastruktur dengan pagu anggaran Rp516.000.000,00

Instansi Pelaksana: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Peruntukkan: Padat Karya Infrastruktur untuk 4 lokasi @ Rp 129.000.000,- yaitu Kelurahan Bener (RT 04 RW 01) dan Kelurahan Prawirodirjan (RT 47 RW 14) berupa pembuatan talud, sementara itu Kelurahan Kotabaru (RT 21 RW 04) dan Kelurahan Klitren (RT 03 RW 01) berupa pemasangan paving block.

Progres: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2019 selama 18 hari dengan 52 orang pekerja untuk masing-masing lokasi. Kegiatan tersebut meliputi cek lokasi, monitoring serta rapat koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bergantian. Untuk Kelurahan Bener, Kelurahan

Prawirodirjan dan Kelurahan Kotabaru akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2019.

Faktor Penghambat: Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas PUPKP untuk Kelurahan Klitren, pelaksanaan mundur dari tatakala yaitu pada bulan September Tahun 2019 karena lokasi pelaksanaan padat karya bersamaan dengan pekerjaan PU yaitu pembuatan IPAL dan resapan.

c. BKK Jambanisasi dengan pagu anggaran Rp270.000.000,00

Instansi Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Peruntukkan: pembangunan jamban bagi 30 penerima sebesar @ Rp 9.000.000,- untuk pembelian bahan material dan upah tukang.

Progres: Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DIY untuk membahas petunjuk teknis sehingga bisa dijadikan acuan sekaligus melakukan validasi data penerima manfaat. Tanggal 10 April 2019, Dinas Kesehatan telah mengundang penerima manfaat untuk membahas teknis pelaksanaan sampai dengan pembuatan laporan. Terdapat 5 arsip yang telah ditandatangani oleh penerima manfaat. Dari 30 penerima manfaat yang memenuhi syarat hanya 28 penerima.

G. Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 6,98%, atau sejumlah 29,75 Ribu Jiwa. Tingkat kemiskinan tersebut turun sekitar 0,66% dari tahun 2017 (7,64%). Adapun pada tahun 2019, angka kemiskinan ditargetkan di Kota Yogyakarta adalah 6,24% jika mengacu pada dokumen RPJMD DIY 2017-2022. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2019 ini meliputi:

1. Melalui Belanja Langsung APBD Kota Yogyakarta

Anggaran belanja langsung melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebesar Rp139.523.148.898,00. Anggaran ini tersebar pada beberapa perangkat daerah yakni Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas PUPKP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM Nakertrans, dan Dinas Pariwisata. Adapun peruntukannya antara lain untuk pembinaan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas warga miskin melalui pemberian kursus dan pelatihan, pendampingan kelompok usaha perempuan, jaminan pendidikan untuk siswa tidak mampu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, bayi dan balita gizi buruk, penataan perumahan dan permukiman tata bangunan, pelayanan pendaftaran penduduk, pengembangan kewirausahaan melalui pembinaan dan pelatihan produktifitas tenaga kerja serta peningkatan kualitas atraksi pariwisata. Realisasi

sampai dengan triwulan II yang bersumber dari simplaporan.jogjakota.go.id adalah sebesar Rp 28.142.982.769,00.

2. Melalui Belanja Tidak Langsung APBD Kota Yogyakarta

Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam rangka intervensi kemiskinan sebesar Rp11.735.950.000,00. Anggaran ini digunakan untuk memberikan hibah kepada K3S dan IPSM Kota Yogyakarta, bantuan sosial kepada lanjut usia miskin, pemberian santunan kematian, orang terlantar, penyandang disabilitas, IPSM dan Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai. Adapun progress sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

- Hibah IPSM sudah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 431.000.000,-
- Hibah untuk Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai dan K3S belum dilaksanakan.
- Bantuan sosial kepada penyandang disabilitas terealisasi sebanyak 164 orang x Rp. 300.000 x 4 bulan = Rp. 196.800.000,00
- Bansos berupa asistensi lanjut usia miskin (ASLUM) terus menurun dikarenakan data sangat dinamis, selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi kesehatan lansia miskin tersebut. Bansos lansia miskin diberikan dalam dua tahap. Dari data awal sebanyak 6.360 lansia miskin, ada sebanyak 4.120 orang yang lolos verifikasi dan validasi dalam pencairan tahap pertama di bulan April – Mei.
- Pemberian santunan kematian dari target 800 orang sampai dengan akhir bulan juni terealisasi sebanyak 278 orang dengan besaran 2 juta per orang (warga miskin)
- Bansos untuk orang terlantar dengan anggaran murni sebesar Rp. 50.000.000,- tidak banyak terserap sehingga di perubahan dikurangi menjadi Rp. 40.000.000. Hal ini dikarenakan sistem yang dibangun untuk memberikan bantuan sosial jenis ini sudah terbangun dengan lebih baik dengan laporan dari kepolisian terhadap pemeriksaan sidik jari dan iris mata.

3. Bantuan Keuangan Pemda DIY

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemda DIY sebesar Rp1.236.000.000,00 yang terbagi dalam 3 peruntukan yakni : (1) BKK UEP PKH bagi Keluarga Miskin dan RTSM PKH untuk penguatan modal bagi 155 orang dengan nominal @Rp 3.000.000,00 , (2) BKK Jambanisasi untuk Pemberian bantuan sosial untuk pembelian alat dan bahan material serta upah kerja bagi 30 orang@ Rp 9.000.000,00, (3) BKK Padat karya Padat Karya Infrastruktur untuk 4 lokasi @ Rp129.000.000,00 yaitu Kelurahan Bener dan Kelurahan Prawirodirjan berupa pembuatan talud, sementara Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Klitren berupa pemasangan *paving block*. Progres sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut: (1) Dari hasil verifikasi dan validasi data oleh pendamping PKH sampai dengan akhir Juni, dari 150 penerima manfaat BKK UEP PKH yang memenuhi syarat hanya 115 penerima. Untuk pencairan dana terhadap 115

penerima dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis bertahap selama 2 hari. Untuk penerima manfaat yang telah tervalidasi jika tidak hadir dalam bimbingan teknis tersebut dianggap gugur. Sampai dengan akhir Juni sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial DIY terkait pergantian penerima manfaat dan masih menunggu SK Gubernur berdasarkan BNBA yang telah dikirimkan sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, (2) Dinas Kesehatan telah mengundang penerima manfaat untuk membahas teknis pelaksanaan sampai dengan pembuatan laporan terkait penyaluran dana BKK Jambanisasi. Terdapat 5 arsip yang telah ditandatangani oleh penerima manfaat. Dari 30 penerima manfaat yang memenuhi syarat hanya 28 penerima. setelah diverifikasi ulang terdapat 2 penerima manfaat yang gagal disalurkan dana tersebut dikarenakan tempat tinggal telah rubuh serta alamat dan nama penerima manfaat bersangkutan tidak sesuai dengan data validasi yang terakhir, (3) Kegiatan BKK Padat karya Padat Karya Infrastruktur akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2019 selama 18 hari dengan 52 orang pekerja untuk masing-masing lokasi. Kegiatan tersebut meliputi cek lokasi, monitoring serta rapat koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bergantian. Untuk Kelurahan Bener, Kelurahan Prawirodirjan dan Kelurahan Kotabaru akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2019.

4. Dana APBN

Alokasi dana APBN tahun 2019 yang dipergunakan untuk penanggulangan kemiskinan dijelaskan dalam rincian sebagai berikut ini :

1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 185/HUK/2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, Kota Yogyakarta menyalurkan BPNT melalui Dinas Sosial dengan pagu anggaran Rp23.276.880.00,00 dengan volume 17.634 KPM dengan anggaran per Kepala Keluarga Rp110.000,00 x 12 Bulan = Rp1.320.000,00/tahun yang langsung diberikan melalui rekening tiap penerima bantuan per bulannya dan bisa dibelanjakan oleh keluarga penerima manfaat di -warong untuk memperoleh bantuan.

2) Program Keluarga Harapan (PKH)

Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp14.869.325.000,00 dengan jumlah penerima sebanyak 12.176 orang yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp31.996.500.000,00.

3) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada Tahun 2019 program RTLH Kota Yogyakarta memberikan bantuan melalui stimulan peningkatan kualitas dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan. Pada Tahun 2019 bantuan RTLH melalui DAK pada Sub Bidang Perumahan dan Permukiman yang tersebar dari beberapa titik lokasi dengan total pagu anggaran Rp3.115.000.000,00, melalui metode swakelola

yang disalurkan melalui Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Realisasi sampai dengan TW II sebesar Rp559.600.000 dengan rincian sasaran sebagai berikut:

- Kelurahan Prenggan: 22 rumah
- Kelurahan Purbayan: 4 rumah
- Kelurahan Muja Muju: 41 rumah
- Kelurahan Giwangan: 16 rumah
- Kelurahan Klitren: 18 rumah
- TMMD di Kelurahan Purbayan: 5 rumah

5. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dana CSR yang diperoleh sampai dengan TW II 2019 berasal dari (1) Bank BPD DIY sebesar Rp553.256.000,00 untuk bantuan kelompok dan rintisan usaha, pembinaan sekolah ramah anak, kampung ramah anak, dan puskesmas ramah anak, serta penanganan RTLH, (2) Bank Jogja sebesar Rp 200.000.000,00 untuk pengadaan sarpras pendidikan, pelatihan kuliner, kampung ramah anak dan pengadaan RTLH. Pencairan dana dilaksanakan secara bertahap per sektor dimulai dengan mekanisme pembukaan rekening kelompok. Secara khusus, rincian dana CSR dari Bank BPD DIY per sektor sebagai berikut:

- 1) sektor sosial ekonomi sebesar Rp257.980.150,00 dengan penerima 14 kelompok ekonomi dan 4 kampung ramah anak;
- 2) sektor kesehatan sebesar Rp109.275.850,00 dengan penerima 3 puskesmas ramah anak dan 4 posyandu ramah anak;
- 3) sektor pendidikan sebesar Rp96.000.000,00 dengan penerima 2 sekolah ramah anak dan 4 sekolah inklusi;
- 4) sektor fisik sebesar Rp90.000.000,00 dengan penerima 6 RTLH.

H. Catatan dan Rekomendasi :

Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas, disampaikan beberapa catatan dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan mendatang sebagai berikut :

- 1) Realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan yang sebesar 44,61% masih memiliki deviasi 4,65% dari target, dan cenderung meningkat dari deviasi pada Triwulan I. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peningkatan jumlah kegiatan dengan deviasi fisik > 5% dari 105 kegiatan di Triwulan I menjadi 162 kegiatan pada Triwulan II. Beberapa penyebab merupakan faktor eksternal, seperti sifat kegiatan yang merupakan penyediaan (realisasi disesuaikan dengan kebutuhan) serta adanya revisi penambahan syarat di dokumen tender terkait K3 (terkait Permen PU 7/2019) untuk pekerjaan konstruksi yang menyebabkan pelaksanaan mundur dari tatakala semula. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta tetap perlu melakukan pengendalian internal, identifikasi secara lebih mendalam terhadap masing-masing hambatan

pelaksanaan dengan mengoptimalkan sistem pelaporan dari seluruh OPD, sehingga dapat diberikan saran/rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan di triwulan selanjutnya. Secara khusus identifikasi ini juga untuk meyakinkan realisasi fisik yang dilaporkan jauh lebih tinggi dari realisasi keuangannya, sedangkan disinyalir masih ada cukup banyak kegiatan yang mundur dari tata kala yang dijadwalkan semula.

- 2) Realisasi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta hingga akhir Triwulan II dilaporkan sebesar Rp278.095.680.720,07 atau 25,57% dari target anggaran kas. Deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang sebesar 21,92% juga meningkat tajam dari kondisi Triwulan I dengan angka 9,47%. Kondisi tersebut didukung fakta adanya peningkatan jumlah kegiatan dengan deviasi keuangan >10%, dari sebanyak 524 kegiatan di Triwulan I, menjadi sejumlah 548 kegiatan pada Triwulan II. Untuk realisasi keuangan yang bersifat menyesuaikan kebutuhan, sisa pengadaan barang/jasa, dan upaya efisiensi yang telah dilakukan perlu mendapat apresiasi, namun untuk hal-hal yang bersifat keterlambatan/ketidak sesuaian dengan tata kala perlu menjadi perhatian khusus, seperti keterlambatan pembuatan SPJ kegiatan, keterlambatan proses pencairan honorarium pelaksana kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan mundur dari tata kala, agar menjadi perhatian. Mempertimbangkan realisasi keuangan hingga akhir TW II yang masih tergolong rendah, akselerasi perlu ditingkatkan antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa kendala secara lebih mendalam, sehingga ada upaya terobosan untuk memastikan belanja pemerintah pada triwulan berikutnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memberikan dampak kepada perekonomian Kota pada umumnya serta masyarakat pada khususnya.
- 3) Kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme tender sampai dengan akhir Triwulan II mencapai 65 paket, relatif masih jauh dari target yang direncanakan sebesar 135 paket. Dengan demikian terhadap target TW II, terdapat sisa paket yang belum selesai sebanyak 73 paket dengan rincian 11 paket dalam antrian, 45 paket dalam proses, dan 17 paket dalam proses reuiv dokumen. Adapun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket tender yang dimiliki yakni 159 paket, maka Pemerintah Kota Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk penyelesaian tender sebanyak 94 paket. Mencermati hal tersebut, agar dilakukan percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, serta melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang sudah dalam pelaksanaan fisik oleh penyedia barang/jasa, untuk memastikan kualitas hasil pengadaan tetap terjaga, mengingat adanya selisih yang cukup signifikan dari total HPS dan nilai kontrak yang sudah ada, demikian halnya kemunduran jadwal tentunya berpengaruh pada kecukupan waktu pelaksanaan di lapangan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mohon dapat dipastikan selaras dengan mandat keistimewaan DIY sesuai Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2012. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi harus dilakukan dengan cermat dan aktif melakukan koordinasi dengan pengampu kepentingan terkait. Secara umum realisasi pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan oleh KPA di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya untuk kinerja keuangan, hingga akhir Triwulan II masih belum optimal, sehingga perlu upaya percepatan dengan tetap memperhatikan tertib administrasi serta menjaga kualitas pelaksanaannya. Perlu diingatkan kembali bahwa tata kelola keuangan dana keistimewaan pencairannya melalui mekanisme termin, saat ini dibutuhkan capaian realisasi minimal 80% untuk mengajukan termin berikutnya (Tahap II), oleh karenanya dimohon agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan segera diikuti dengan pertanggungjawaban keuangannya. Beberapa hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan kegiatan juga mohon untuk dapat dikawal, diantaranya yang terkait dengan pengelolaan kawasan Malioboro dan sekitarnya.

- 5) Bantuan keuangan dari Pemda DIY, khususnya yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, mohon dapat dikelola dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan bisa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kota dengan Pemda DIY, maupun antar OPD teknis diharapkan pelaksanaan BKK dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Target penurunan kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 7,35% jika mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota. Mempertimbangkan capaian pada tahun 2018 yang telah pada angka 6,98% maka secara ideal target 2019 lebih baik mengacu pada target sesuai RPJMD DIY 2017-2022 yakni pada angka 6,24%. Oleh karenanya meskipun pemetaan intervensi sudah terlihat rapi dan baik, agar dipastikan peningkatan kualitas program/kegiatan yang didesain untuk menurunkan angka kemiskinan, baik yang bersumber dari APBN, BKK Pemda DIY maupun dari APBD Kota Yogyakarta serta dana CSR, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat secara nyata memberikan hasil yang maksimal.
- 7) Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II, secara umum masih diperlukan pengendalian yang lebih cermat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan refleksi terhadap progress pelaksanaan yang sudah dilakukan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 ini, antara lain dalam hal kinerja fisik dan keuangan, pelaksanaan tender barang/jasa, pelaksanaan dana keistimewaan, upaya pengurangan kemiskinan, serta target kinerja lainnya. Agar dipastikan bahwa upaya dalam mencapai target-target tersebut sudah berjalan dengan baik, melakukan koordinasi yang intensif dengan *stake holder*, dan

merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Demikian disampaikan Laporan atas pelaksanaan pengendalian pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 untuk Pemerintah Kota Yogyakarta. Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah Saudara lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan kami berharap kinerjanya dapat dioptimalkan dimasa yang akan datang

Yogyakarta, Juli 2019

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut disampaikan hasil pelaksanaan pengendalian pembangunan sebagai berikut:

A. APBD yang Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2019 mengelola APBD sebesar Rp1.711.750.557.033,88,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp877.735.506.072,88 dan Belanja Langsung sebesar Rp834.015.050.961,00 yang terdistribusi pada pelaksanaan 257 program dan 954 kegiatan di 42 unit OPD.

B. Target dan Realisasi Fisik

Realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Bulan	Fisik		Deviasi (%)	Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi (Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi penyebab)
	Target (%)	Realisasi (%)		
s.d. 30 Juni 2019	54,00	51,19	2,81	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarpras yang mundur dari jadwal (e-catalog, juknis tidak implementatif, spek tidak sesuai rekomendasi) Diklat non formal (belum ada penawaran yang sesuai)

C. Target dan Realisasi Keuangan

Target dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja disampaikan melalui tabel berikut :

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi* (Rp)	Realisasi* (%)	Deviasi (%)	
s.d. 30 Juni 2019	Belanja Pegawai	21.856.508.950	37,75	19.267.604.152	33,27	4,48	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran honor tim BLUD terlambat 1 bulan (RSUD wates, 800jt) Penurunan jumlah GTT/PTT SD (selisih 700jt)
	Belanja Barang dan Jasa	176.612.883.562	52,16	149.235.694.502	44,07	8,09	<ul style="list-style-type: none"> Belanja BLUD disesuaikan dengan pelayanan pasien (menurun karena rujukan berjenjang), menurunnya peserta diklat dan belum adanya ijin praktek dokter spesialis (RSUD Wates, 23,4M) Keterlambatan administrasi dari sekolah-sekolah (PBP SMP 1,1M) Pembayaran premi JKN APBD sebagian sudah dibayarkan dengan pajak rokok (Dinkes 1,9M).
	Belanja Modal	180.789.045.649	41,32	92.534.647.196	21,15	20,17	<ul style="list-style-type: none"> uang muka berkurang

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi* (Rp)	Realisasi* (%)	Deviasi (%)	
							<p>karena nilai kontrak jauh dibawah pagu (DPUPKP, 2,1M)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung BPP Temon dan Puskesmas temon mundur dari jadwal (dipertapang, 1,1M); • Belanja Modal RSUD Wates (Gedung selisih 23,2M karena tidak cermat menyusun anggaran kas; DAK selisih 2,76M karena belum semua barang diterima; BLUD 900jt) • Rehab rekon (Jalan, Lelang mundur), (Irigasi, uang muka berkurang karena nilai kontrak jauh dibawah pagu) (BPBD, 9,3M) • Belanja Modal RSUD NAS (7M) • Belanja Modal Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP (4,5M) • Belanja Modal Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan SD (3,1M) • Belanja Modal Peralatan keg. Penyehatan sanitasi Lingkungan (Dinkes 1,9M) • Belanja peralatan Pelayanan Kemetrolagian masih menunggu selesai kalibrasi (700jt) • Sisa lelang antropometri kit (650jt) • Belanja modal kegiatan dais mundur dari jadwal (1,6M)
	TOTAL	379.258.438.161	45,47	261.037.945.850	31,30	14,17	

D. Prosentase Kegiatan dengan deviasi Fisik $\geq 5\%$ dan Keuangan $\geq 10\%$

Kriteria	% terhadap keseluruhan kegiatan	Faktor Penghambat
Deviasi fisik $\geq 5\%$	14,46% (138 kegiatan dari 954 kegiatan)	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan sarpras yang mundur dari jadwal (e-catalog, juknis tidak implementatif, spek tidak sesuai rekomendasi)• Diklat non formal (belum ada penawaran yang sesuai)
Deviasi keuangan $\geq 10\%$	41,61 % (397 kegiatan dari 954 kegiatan)	<ul style="list-style-type: none">• Keterlambatan proses administrasi (semua OPD)• Penundaan pelaksanaan kegiatan (jadwal diklat, perubahan DPA, e-catalog, juknis tidak implementatif)• Kontrak-kontrak yang nilainya jauh di bawah pagu.

E. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019

Kinerja Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui tender pada Kabupaten Kulon Progo sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Jumlah Seluruh Paket Pengadaan Tahun 2019 (Yang Harus melalui tender)	Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan(Rp) (Yang Harus melalui tender)	Realisasi Jumlah Paket selesai tender s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019	Realisasi Paket yang selesai tender s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019 (harga penawaran) (dalam Rp)
167 paket	265.640.298.804,00	98 paket	136.529.642.823,00

Dari target lelang tahun 2019 sejumlah 167 paket, ditargetkan akhir triwulan II selesai sejumlah 155 paket atau 93%. Dari target tersebut telah terealisasi lelang sebanyak 98 paket atau mencapai 59% yang terdiri dari 72 paket lelang konstruksi, 10 paket lelang konsultasi, 15 paket lelang barang/jasa, dan 1 paket jasa lainnya.

F. Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan sampai dengan Triwulan II tahun 2019

Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan, Urusan Tata Ruang, dan Urusan Kelembagaan sebesar Rp27.295.906.500,00. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019 realisasi fisik tercapai 34,57% dari target sebesar 44,60%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp2.827.062.966,00 atau 10,36% dari target yang sebesar Rp9.167.444.550,00 atau 33,59%. Pada Triwulan II tahun 2019 secara umum sudah terlaksana beberapa kegiatan namun ada pula yang baru proses persiapan kegiatan dan proses pengadaan. Berikut penjelasan masing-masing urusan:

1. Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo melalui pelaksanaan sebanyak 2 program dan 2 kegiatan. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan II tahun 2019 untuk draft Raperda sudah disampaikan ke dewan. Untuk Program Peningkatan Budaya Pemerintahan, Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo sudah selesai dilaksanakan untuk sosialisasi budaya pemerintahan dan pembentukan agen perubahan. Capaian fisik untuk urusan kelembagaan sampai dengan Triwulan II sebesar 41,20% dari target sebesar 44,40%, sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar Rp100.234.488,00 atau 20,05%, dari target sebesar Rp228.966.500,00 atau 45,79%.

2. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo melalui pelaksanaan 4 program dan 16 kegiatan, serta dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kab Kulon Progo sebanyak 1 program dan 1 kegiatan. Pada Dinas Kebudayaan secara umum beberapa event sudah terlaksana, seperti bimtek, macapat, lomba cerdas cermat, gelar upacara adat, workshop, beberapa kegiatan yang lain masih proses persiapan dan koordinasi. Pada Dinas PUPKP yaitu kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya, berupa Pembangunan jalan dan penerangan pada kawasan Eks Pengepul Nila Bulurejo dan Pembangunan pedestrian jalan dan penerangan koridor makam Girigondo. Pada triwulan II sudah dilakukan kontrak tanggal 29 Mei 2019. Capaian kinerja fisik untuk urusan kebudayaan sampai dengan Triwulan II sebesar 41,30% dari target sebesar 46,84%, dan realisasi keuangan sebesar Rp2.275.833.828,00 atau 12,22% dari target sebesar Rp6.281.761.850,00 atau 33,73%.

3. Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kulon Progo dan Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo masing-masing dengan pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan. Pada Dinas Pertanian dan Pangan berupa Penataan kawasan 1B pada kawasan Tonogoro, progress pada Triwulan II sudah mulai dilaksanakan proses pengadaan. Pada Dinas Pariwisata berupa Penataan kawasan 1C pada kawasan Tonogoro, pada Triwulan II sudah mulai proses pengadaan. Capaian kinerja fisik untuk urusan tata ruang sampai dengan Triwulan II sebesar 14% dari target Triwulan II sebesar 36%, sedangkan untuk capaian kinerja keuangan sebesar Rp102.591.200,00 atau 1,79% dari target sebesar Rp1.642.261.200,00 atau 28,68%.

4. Urusan Pertanahan

Kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo melalui pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan. Pada Triwulan II dilaksanakan pemberkasan, pembuatan patok dan pembayaran petugas ukur. Capaian fisik untuk urusan pertanahan sampai dengan Triwulan II sebesar 31,01% dari target sebesar 47,06%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp348.403.450,00 atau 14,25% dari target sebesar Rp1.014.455.000,00 atau 41,50%.

G. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus

Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersifat Khusus (BKK) dari Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp74.932.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi fisik tercapai 61,69% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp23.247.000.000,00 atau sebesar 31,02%. Berikut penjelasan masing-masing peruntukan :

1. Modal usaha UEP PKH, berupa bantuan modal usaha bagi KK miskin dialokasikan untuk 180 orang @ Rp 3juta, pada 4 kecamatan yaitu : (1) Kecamatan Pengasih : Desa Pengasih, Kedungsari, Sidomulyo, Margosari, Karang Sari, Sendangsari, Tawang Sari; (2) Kecamatan Lendah : Desa Bumirejo, Wahyuharjo, Gulurejo, Ngentakrejo, Jatirejo, Sidorejo; (3) Kecamatan Girimulyo : Desa Pendoworejo, Jatimulyo, Giripurwo, Purwosari; dan (4) Samigaluh : Desa Ngargosari, Purwoharjo, Sidoharjo, Pagerharjo, Banjarsari, Gerbosari Progress pada Triwulan II berupa penyiapan data 45 KPM pengganti, sudah diusulkan untuk perubahan Pergub.
2. Padat karya infrastruktur berupa pembangunan jalan desa sebanyak 16 lokasi, pada 8 kecamatan yaitu di : (1) Kayugede, Gerbosari Samigaluh; (2) Jati, Gerbosari, Samigaluh; (3) Gebang, Sidoarjo, Samigaluh; (4) Nyemani, Sidoarjo, Samigaluh; (5) Tegalrejo, Hargowilis, Kokap; (6) Nganti, Hargotirto, Kokap; (7) Sekaro, Giripurwo, Girimulyo; (8) Karangasem, Sidomulyo, Pengasih; (9) Girinyono, Sendangsari, Pengasih; (10) Dukuh, Karang Sari, Pengasih; (11) Dukuh-Josutan, Karang Sari, Pengasih; (12) Pantog Wetan, Banjaroyo, Kalibawang; (13) Jatisari, Jatirejo, Lendah; (14) Sumurmuling, Gulurejo, Lendah ; (15) Ngrandu, Kaliagung, Sentolo; (16) Pleret, Panjatan Pada Triwulan II tahapan kegiatan yaitu koordinasi, dan proses penyusunan SK Bupati. Jumlah tenaga kerja untuk masing-masing lokasi sebanyak 52 orang tiap lokasi.
3. Jambanisasi berupa bantuan pembangunan jamban @ Rp 1,5 juta untuk 152 penerima, pada 5 kecamatan yaitu : (1) Kecamatan Galur : Desa Karangsewu dan Brosot. (2) Kecamatan Lendah : Desa Sidorejo dan Bumirejo. (3) Kecamatan Pengasih : Desa Karang Sari. (4) Kecamatan Kokap : Desa Hargotirto dan Hargowilis.

(5) Kecamatan Sentolo : Desa Sukoreno, salamrejo, Srikayangan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan verifikasi lapangan sebanyak 74 penerima dan perubahan nama penerima sebanyak 78 orang penerima.

4. Progres Pembangunan RSUD Wates berupa pembangunan pengembangan RSUD Wates secara *multi years*. Pelaksana pembangunan konstruksi oleh PT. Nindya Karya (Persero) dengan kontrak senilai Rp258.300.000.000,00 per tanggal 7 Agustus 2018, masa kerja 525 hari kalender. Tahun 2018 sudah terbayarkan Rp100.737.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 realisasi keuangan senilai Rp46.494.000.000,00, dan capaian fisik pembangunan rata-rata sebesar 83,08% dari target 88% untuk 6 kegiatan meliputi: pekerjaan Persiapan, pembangunan lanjutan gedung medik, pembangunan gedung Irna, pembangunan gedung asrama mahasiswa, gedung apartemen, pembangunan infrastruktur dan utilitas.
5. Pembangunan Pengembangan Pasar Hewan Terpadu Pengasih berupa pembangunan pengembangan Pasar Hewan Pengasih sudah kontrak tanggal 18 Juni 2019 dengan waktu pelaksanaan 120 hari dengan nilai kontrak Rp2.000.986.126,00 meliputi pembangunan pasar burung berupa petshop, kios burung, kantin, toilet, jalan lingkungan, pembuatan saluran drainase dan bak kontrol.
6. Pembangunan jaringan listrik untuk Operasional SPAM Hargowilis, berupa pembangunan jaringan listrik di sekitar Sermo. Sampai dengan Triwulan II 2019 proses perubahan perencanaan sudah selesai, dimana ada perubahan spesifikasi dari PLN, yaitu untuk mengganti kabel sesuai rekomendasi PLN Area Yogyakarta berupa kabel MVTIC. Proses lelang pada tahap evaluasi diperkirakan bulan Juli sudah kontrak.

H. Program Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan indikator angka kemiskinan pada tahun 2018 target angka 18,25%. Angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 18,3% (Sumber data : Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon progo, BPS 2018), sehingga realisasi belum dapat mencapai target dengan masih ada gap 0,05%. Sedangkan target angka kemiskinan tahun 2019 pada Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah 17,25%. Dengan menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) berdasarkan SK menteri sosial nomor 71/HUK/2018 terdapat 105.864 warga Kulon Progo yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 DTPPFM. Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, dana Bantuan Keuangan Khusus dari pemda DIY, APBN serta dari

Baznas Kulon Progo dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berikut detail beberapa intervensi yang dilakukan pada Tahun 2019:

1. Intervensi kemiskinan tersebut melalui program kegiatan belanja langsung APBD Kulon Progo 2019, antara lain :
 - a. pembayaran premi JKN untuk 37.000 jiwa selama 12 bulan, per jiwa akan mendapatkan alokasi Rp23.000,-/bulan, terealisasi 44.255 jiwa.
 - b. Bantuan sapi untuk 11 kelompok, per kelompok akan mendapat alokasi Rp 79.750.000,-.
 - c. Bantuan kambing untuk 8 kelompok, per kelompok akan mendapat alokasi Rp 35.200.000,-.
 - d. Bantuan domba untuk 2 kelompok, per kelompok akan mendapat alokasi Rp 33.100.000,-
 - e. Bantuan ternak ayam untuk 2 kelompok, per kelompok akan mendapat alokasi Rp 15.304.000,-.
 - f. Bantuan ternak itik untuk 2 kelompok, per kelompok akan mendapat alokasi Rp 22.635.000,-.
 - g. Bantuan sarana produksi gurami untuk 2 kelompok, total anggaran untuk 2 kelompok senilai Rp 139.232.000,-.
 - h. Bantuan sarana produksi lele untuk 4 kelompok, total anggaran untuk 4 kelompok senilai Rp 347.650.000,-.
 - i. Bantuan sarana perbenihan lele untuk 1 kelompok, dengan alokasi Rp 49.381.000,-.
 - j. Bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM untuk 7 kelompok, total anggaran untuk 7 kelompok senilai Rp 51.020.000,-.
 - k. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja untuk 32 pencari kerja, total pagu kegiatan Rp 191.425.200,-.
 - l. Bantuan sambungan listrik rumah untuk 150 sambungan, per sambungan akan mendapat alokasi Rp 1.650.000,-.
2. Intervensi kemiskinan melalui Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten antara lain :
 - a. Bantuan Siswa Miskin dengan alokasi Jenjang SD untuk 360 siswa @ Rp1.000.000,-dan Jenjang SMP untuk 300 siswa @ Rp 1.350.000,-.
 - b. Jambanisasi untuk 750 KK, per KK mendapat alokasi Rp1.500.000,-.
 - c. Lantanisasi untuk 100 KK, per KK mendapat alokasi Rp2.000.000,-
 - d. Jaminan Hidup Orang Tua/Lansia Terlantar untuk 750 orang, per orang mendapat alokasi Rp3.600.000,-.
 - e. RTLH untuk 350 KK, per KK mendapat alokasi Rp15.000.000,-
 - f. Ekonomi Produktif Penumbuhan untuk 1 kelompok Rp 20.000,000,-, dan Pengembangan untuk 49 kelompok dengan alokasi per kelompok Rp12.500.000,-.

- g. Bantuan bagi Penyandang Disabilitas untuk 200 orang, per orang mendapat alokasi Rp Rp2.500.000,-.
 - h. Jaminan hidup bagi PMKS Miskin untuk 132 orang, per orang mendapat alokasi Rp3.600.000,-.
 - i. Bantuan Kecelakaan Kerja bagi Penderes Kelapa untuk 37 orang, dengan alokasi cacat berat per orang Rp 15.000.000,- dan meninggal atau cacat ringan per orang Rp5.000.0000,-.
 - j. Bantuan bagi Anak Balita Terlantar untuk 100 anak, per anak mendapat alokasi Rp1.000.000,-.
 - k. Bantuan yatim piatu untuk 200 anak, per anak mendapat alokasi Rp 500.000,-.
 - l. Rekonstruksi Rumah berat untuk 50 KK, per KK mendapat alokasi Rp50.000.000,-.
 - m. Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo untyk 23 panti, dengan total pagu Rp360.000.000,-.
 - n. Hibah untuk pemasangan Air Minum Pedesaan Hibah untuk 16 Kelompok Keswadayaan Masyarakat, dengan total pagu Rp2.000.000.000,-
 - o. Hibah pendampingan padat karya untuk 7 LPMD (Padat Karya Jalan Lingkungan), per kelompok mendapat alokasi Rp100.000.000,-.
3. Intervensi kemiskinan dari Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersifat Khusus (BKK) dari Pemda DIY antara lain :
- a. Modal usaha UEP PKH, berupa bantuan modal usaha bagi KK miskin untuk 180 orang masing-masing dengan alokasi Rp3.000.000,-.
 - b. Padat karya infrastruktur berupa pembangunan jalan desa sebanyak 16 lokasi dengan tenaga kerja dari KK miskin, tiap lokasi mendapat alokasi Rp129.000.000,-.
 - c. Jambanisasi berupa bantuan pembangunan jamban untuk 152 penerima masing-masing dengan alokasi Rp1.500.000,-.
4. Intervensi kemiskinan dari APBN antara lain :
- a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kuota untuk Kabupaten Kulon Progo 51.974 RTS, tiap RTS per bulan mendapat alokasi Rp 110.000,- dalam bentuk beras dan telur. BPNT dilaksanakan dengan memberdayakan eWarong (KUBE) sebanyak 111 eWarong yang mendistribusikan produk lokal dari 12 Gapoktan sebagai penyuplai beras dan 53 kelompok penyuplai telur. Realisasi Triwulan I tersalur untuk 48.985 RTS.
 - b. Program Keluarga Harapan berupa bantuan stimulan, realisasi Triwulan I tersalur untuk 32.458 RTS.
5. Intervensi kemiskinan dari Baznas Kulon Progo dan CSR : yakni bedah rumah, realisasi 11 lokasi dari Baznas @ Rp 15.000.000,- dan 28 lokasi dari Forum CSR, BPD DIY, dll.

I. Catatan dan Rekomendasi :

Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas, beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan yang sebesar 51,19% memiliki deviasi 2,81% dari target dan cenderung meningkat dari deviasi pada Triwulan I. Kondisi tersebut sebenarnya kontradiksi dengan penurunan jumlah kegiatan dengan deviasi fisik > 5% dari 176 kegiatan di Triwulan I menjadi 138 kegiatan pada Triwulan II. Memperhatikan hal tersebut terdapat kemungkinan gap cukup besar terjadi hanya pada beberapa kegiatan yang nilainya besar, oleh karenanya agar dilakukan pencermatan lebih lanjut. Penyebab deviasi diantaranya karena mundurnya jadwal pekerjaan fisik di lapangan karena pengadaan barang/jasa yang terkendala e katalog, juknis yang tidak implementatif, maupun karena belum adanya penawaran yang sesuai untuk kegiatan diklat non formal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan identifikasi secara lebih mendalam terhadap masing-masing hambatan pelaksanaan dengan mengoptimalkan sistem pelaporan dari seluruh OPD, sehingga dapat diberikan saran/rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan di triwulan selanjutnya. Apalagi jika mempertimbangkan masih ada 57 paket tender yang semula ditargetkan selesai di triwulan II namun disinyalir mundur dari tata kala yang dijadwalkan semula.
- 2) Realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga akhir Triwulan II dilaporkan sebesar Rp261.037.945.850,00 atau 31,30% dari target anggaran kas. Deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang sebesar 14,17% juga meningkat tajam dari kondisi Triwulan I dengan angka deviasi 4,76%. Kondisi tersebut terlihat bertolakbelakang dengan adanya penurunan jumlah kegiatan dengan deviasi keuangan > 10%, dari sebanyak 474 kegiatan di Triwulan I, menjadi sejumlah 397 kegiatan pada Triwulan II. Memperhatikan hal tersebut terdapat kemungkinan gap cukup besar terjadi hanya pada beberapa kegiatan yang nilainya besar, oleh karenanya agar dilakukan pencermatan terhadap deviasi yang terjadi utamanya pada belanja barang/jasa dan modal. Secara umum untuk realisasi keuangan yang bersifat menyesuaikan kebutuhan, sisa pengadaan barang/jasa, dan upaya efisiensi yang telah dilakukan perlu mendapat apresiasi, namun untuk hal-hal yang bersifat keterlambatan/ketidak sesuaian dengan tata kala atau anggaran kas perlu menjadi perhatian khusus. Kecermatan dalam penyusunan anggaran kas dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan pekerjaan, juga perlu ditingkatkan pada perencanaan selanjutnya. Adapun mempertimbangkan realisasi keuangan hingga akhir TW II yang masih belum optimal, akselerasi perlu dilakukan antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa kendala secara lebih mendalam, sehingga ada upaya terobosan untuk memastikan belanja pemerintah pada triwulan berikutnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memberikan dampak

kepada perekonomian Kabupaten Kulon Progo pada umumnya serta masyarakat pada khususnya.

- 3) Kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme tender sampai dengan akhir Triwulan II mencapai 98 paket dengan nilai Rp136.529.642.823,00 masih terpaut jauh dari target penyelesaian triwulan II yang sejumlah 155 paket. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket tender yang dimiliki yakni 167 paket, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih memiliki pekerjaan rumah untuk penyelesaian tender sebanyak 69 paket. Mencermati hal tersebut, agar dilakukan percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap paket pekerjaan yang sudah dalam pelaksanaan fisik oleh penyedia barang/jasa, antara lain terhadap paket pekerjaan yang nilai kontraknya jauh di bawah HPS, maupun yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian tender, untuk memastikan kualitas hasil pengadaan tetap terjaga, karena kemunduran jadwal tentunya berpengaruh pada kecukupan waktu pelaksanaan di lapangan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mohon dapat dipastikan selaras dengan mandat keistimewaan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi harus dilakukan dengan cermat dan aktif melakukan koordinasi dengan pengampu kepentingan terkait. Secara umum realisasi pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan oleh KPA di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai Pemegang Anggaran (PA) memiliki kewenangan otonom dalam hal pengelolaan dana keistimewaan yang dialokasikan Pemda DIY melalui mekanisme BKK, sehingga pengendalian pelaksanaan dana keistimewaan sebaiknya juga dilakukan secara lebih intensif, mengingat pelaksanaan selama triwulan II masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitas capaiannya. Termasuk didalamnya tertib administrasi dan jadwal yang sudah disusun sebelumnya, mengingat tata kelola keuangan dana keistimewaan pencairannya melalui mekanisme termin. Saat ini dibutuhkan capaian realisasi minimal 80% untuk mengajukan termin berikutnya (Tahap II), oleh karenanya dimohon agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan segera diikuti dengan pertanggungjawaban keuangannya.
- 5) Bantuan keuangan dari Pemda DIY yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan mohon dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk teknis yang ada sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan bisa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun antar OPD teknis diharapkan pelaksanaan BKK dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dimohon juga selalu aktif berkoordinasi serta secara khusus mengawal Pembangunan RSUD Wates yang dilakukan melalui mekanisme *multi years*.

- 6) Target penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 cukup tinggi yakni 17,25%, sementara capaian tahun 2018 sebesar 18,3%. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang memiliki upaya menurunkan kemiskinan. Pengendalian dan evaluasi sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan, sehingga output yang dihasilkan memberikan dampak penurunan secara signifikan, mengingat tingkat kemiskinan di Kulon Progo diatas rerata provinsi. Pelaksanaan BKK untuk penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar memiliki manfaat bagi pengguna, termasuk halnya dalam upaya mengidentifikasi peran CSR yang diharapkan juga mendorong upaya penurunan kemiskinan sebagai energi tambahan yang membantu Pemerintah Daerah.
- 7) Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II, secara umum masih diperlukan pengendalian yang lebih cermat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan refleksi terhadap progress pelaksanaan yang sudah dilakukan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 ini, antara lain dalam hal kinerja fisik dan keuangan, pelaksanaan tender barang/jasa, pelaksanaan dana keistimewaan, upaya pengurangan kemiskinan, serta target kinerja lainnya. Agar dipastikan bahwa upaya dalam mencapai target-target tersebut sudah berjalan dengan baik, melakukan koordinasi yang intensif dengan *stake holder*, dan merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Demikian disampaikan Laporan atas pelaksanaan pengendalian pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019. Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah Saudara lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan kami berharap kinerjanya dapat dioptimalkan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Juli 2019

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut disampaikan hasil pelaksanaan pengendalian pembangunan sebagai berikut:

A. APBD yang Ditetapkan

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman mengelola APBD sebesar Rp2.800.885.085.871,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.506.722.610.960,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.294.162.474.911,00 untuk melaksanakan 175 program dan 1.515 kegiatan, yang terdistribusi pada 48 unit OPD.

B. Target dan Realisasi Fisik

Capaian Fisik Belanja Langsung sampai dengan triwulan II Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Bulan	Fisik			Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisihan antara Target dan Realisasi (Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi penyebab)
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	
s.d. 30 Juni 2019	46,74	43,25	3,49	<ul style="list-style-type: none">Beberapa paket pekerjaan masih dalam proses pengadaan

C. Target/Realisasi Keuangan

Target dan realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja disampaikan melalui tabel berikut :

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan (Belanja Langsung)					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)*	Deviasi (%)	
s.d. 30 Juni 2019	Belanja Pegawai	108.095.017.603,00	50,78	96.143.093.456,00	45,17	5,61	Kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan namun sebagian belum merealisasikan honor
	Belanja Barang dan Jasa	348.034.562.251,68	47,94	261.497.725.655,88	36,01	11,93	Beberapa kegiatan masih dalam proses penyelesaian administrasi pengadaan
	Belanja Modal	170.947.692.607,30	39,38	53.249.333.634,10	12,27	27,11	Beberapa Paket masih dalam proses pengadaan
	Total	627.077.272.461,98	45,67	410.890.152.745,98	29,93	15,74	

D. Prosentase Kegiatan dengan deviasi Fisik $\geq 5\%$ dan Keuangan $\geq 10\%$

Kriteria	% terhadap keseluruhan kegiatan	Faktor Penghambat
Deviasi Fisik $\geq 5\%$	31%	Keterlambatan Lelang
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$	26%	Keterlambatan Lelang

E. Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang harus melalui tender sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2019 (Yang harus melalui tender)	Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan (Rp) (Yang harus melalui tender)	Realisasi jumlah paket selesai tender s.d. Akhir Triwulan II/2019	Realisasi Paket yang selesai tender s.d. Akhir TW II/2019 (dalam Rp)
270 Paket	475.854.204.520	159 Paket	115.517.802.600,83

Sampai dengan akhir Triwulan II, realisasi tender sebanyak 159 paket, yang terdiri dari 95 paket konstruksi, 30 paket jasa konsultasi, 15 paket barang, 19 paket jasa lainnya. Kendala/permasalahan umum dalam proses tender pengadaan barang/jasa sampai dengan Triwulan II berupa gagal lelang untuk sekitar 39 paket, sehingga harus dilakukan tender ulang, yang imbasnya jadwal pelaksanaannya mundur dari yang direncanakan sebelumnya.

F. Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 di Kabupaten Sleman sebesar Rp25.896.986.100,00 untuk melaksanakan 4 urusan yakni Pertanahan, Tata Ruang, Kelembagaan dan Kebudayaan. Secara total realisasi fisik sampai dengan triwulan II sebesar 48,87%* dari target yang sebesar 59,78%*. Adapun dari sisi keuangan realisasinya sebesar Rp6.127.643.038,00* dari target yang sebesar Rp9.724.177.400,00*. Uraian progres pelaksanaan kegiatan keistimewaan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Urusan Kebudayaan

Pagu dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman sebesar Rp17.057.297.200,00. Realisasi sampai dengan triwulan II, secara fisik sebesar 32,7%* dari target 35,6%*. Adapun dari sisi keuangan terealisasi Rp4.509.365.882,00* dari alokasi anggaran kas yang sebesar Rp5.188.586.100,00*. Rincian pelaksanaan sampai dengan triwulan II meliputi :

- Kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan secara fisik terealisasi 65% dari target 67%, sedangkan dari sisi keuangannya dari alokasi anggaran kas sebesar Rp144.237.000,00 terserap Rp143.427.000.
- Kegiatan pembinaan pengembangan bahasa dan sastra, fisik terealisasi 45% dari target 48%, adapun untuk keuangan dari target Rp248.747.800,00 terserap Rp229.850.000,00.
- Kegiatan pembinaan dan pengelolaan permuseuman dari target keuangan Rp177.816.200,00 terserap Rp133.381.000,00 sedangkan secara fisik terealisasi 75% dari target 100%.

- d. Kegiatan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya, realisasi fisik dilaporkan sesuai targetnya yang sebesar 20%, sedangkan dari sisi keuangan yang dialokasikan anggaran kas Rp289.619.000,00 terserap sebesar Rp203.345.400,00.
- e. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan taman budaya kab/kota, realisasi fisik 22% dari target 25%, adapun untuk keuangannya dari anggaran kas Rp 40.700.000,00 terserap Rp35.415.882,00.
- f. Kegiatan pembinaan dan pengembangan rintisan desa budaya dan kantong budaya secara fisik terealisasi 29% dari target 30%, sedangkan keuangannya terserap sebesar Rp282.087.000,00 dari target Rp377.292.000,00.
- g. Kegiatan Pembinaan kelembagaan penggiat seni terealisasi 28% dari target 33%, sedangkan untuk keuangannya dari anggaran kas sebesar Rp166.677.100,00 terealisasi Rp40.154.000,00.
- h. Kegiatan misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya, secara fisik terealisasi 30% dari target 33%, adapun untuk keuangannya dari target sebesar Rp191.140.000,00 terealisasi Rp180.873.100,00.
- i. Kegiatan penghargaan seniman dan budayawan, fisik terealisasi 35% dari target 40%, adapun dari sisi keuangan dari pagu sebesar Rp121.137.000,00 terserap Rp70.435.000,00.
- j. Kegiatan Gelar Budaya Jogja, secara fisik terealisasi 44% dari target 47%, sedangkan untuk keuangannya dari anggaran kas Rp1.727.070.500,00 terealisasi Rp955.530.000,00.
- k. Kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan adat dan tradisi, dengan pagu Rp403.312.500,00 terserap Rp287.335.000,00, sedangkan secara fisik terealisasi 33% dari target 38%.
- l. Kegiatan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam kemasyarakatan secara fisik terealisasi 50% dari target 55%, adapun dari segi keuangan dari target Rp1.517.105.500,00 terserap Rp1.242.680.500,00.
- m. Kegiatan penyelenggaraan even penggiat seni terealisasi 38% dari target fisik 40%, sedangkan untuk keuangannya dari target Rp938.200.000,00 terserap Rp712.990.000,00.
- n. Kegiatan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi, realisasi fisiknya telah sesuai target sebesar 40%, sedangkan dari sisi keuangan dari target Rp185.628.500,00 terserap Rp185.628.500,00.

2. Urusan Pertanahan :

Pagu dana keistimewaan untuk urusan pertanahan di Kabupaten Sleman sebesar Rp5.240.768.900,00. Realisasi sampai dengan triwulan II, secara fisik sebesar 28%* dari target 31*. Adapun dari sisi keuangan terealisasi Rp1.509.762.950,00* dari alokasi **anggaran** kas yang sebesar Rp3.256.608.200,00*. Rincian pelaksanaan sampai dengan triwulan II meliputi :

- a. Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten; dari target anggaran Rp3.050.111.300,00, realisasinya Rp1.276.326.750,00*, dengan output sebagai berupa sosialisasi pendaftaran tanah kasultanan sebanyak 400 bidang, pemberkasan tanah sebanyak 400 bidang, penelitian berkas sebanyak 600 bidang, pembuatan dan pemasangan pathok sebanyak 600 bidang, penunjukkan batas sebanyak 600 bidang, dan proses pendaftaran bidang sebanyak 636 bidang;
- b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten dari anggaran Rp111.097.300,00 telah terserap Rp62.001.600,00 namun dari fisiknya masih dilaporkan 0%* ;
- c. Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa dari anggaran kas sebesar Rp95.399.600,00 terealisasi Rp54.716.500,00, sedangkan untuk fisiknya telah sesuai target sebesar 49%. Realisasi output sampai dengan triwulan II meliputi penyusunan daftar rencana pemanfaatan dan pelepasan tanah desa serta pelaksanaan sosialisasi di 3 desa yaitu Madurejo, Umbulmartani, dan Donoharjo.

3. Urusan Tata Ruang

Pagu dana keistimewaan untuk urusan tata ruang di Kabupaten Sleman sebesar Rp3.139.060.000,00. Realisasi sampai dengan triwulan II, secara fisik sebesar 67,07%* dari target 72,5%*. Adapun dari sisi keuangan baru terealisasi Rp108.514.206,00* dari alokasi anggaran kas yang sebesar Rp924.197.600,00*. Rincian pelaksanaan sampai dengan triwulan II meliputi :

- a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo (Rp2.744.675.000,00), realisasi fisik 34,15% dari target 45%, sedangkan dari segi keuangan dari target Rp807.871.500,00 terealisasi Rp100.655.206,00. Adapun progres kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi:
 - a) menyiapkan dokumen KAK, HPS dan dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Penataan Lanskap seluas 3.045 m²;
 - b) penyiapan dokumen KAK, HPS dan dokumen pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Pagar Lokasi sepanjang 109 m;
 - c) Untuk dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lemah Abang, sudah menyusun Berita Acara Koordinasi bersama perangkat desa setempat;
 - d) Dokumen Identifikasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan-Lemah Abang, sudah menyiapkan Dokumen KAK, HPS dan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Identifikasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan – Lemah Abang.
- b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (pagu dana Rp394.385.000,00), realisasi fisik dilaporkan sudah 100%*, padahal dari target maupun realisasi keuangan belum mencerminkan

kinerja fisik sebagaimana dimaksud. Progres Kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi:

- a) Dokumen Revisi RDTR Kecamatan Pakem sudah melakukan koordinasi dan menyiapkan Dokumen KAK, HPS dan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi siap masuk ke BLP DIY;
- b) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Pakem sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c) Materi Teknis RDTR Kecamatan Pakem sudah melakukan koordinasi dan menyiapkan Dokumen KAK, HPS dan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi siap masuk ke BLP DIY;
- d) Dokumen Naskah Akademis Kecamatan Pakem sudah melakukan koordinasi dan menyiapkan Dokumen KAK, HPS dan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi siap masuk ke BLP DIY;
- e) Draf Raperda RDTR Kecamatan pakem sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Urusan Kelembagaan

Alokasi keistimewaan pada urusan kelembagaan dilakukan melalui Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan pagu Rp459.860.000,00. Kegiatan yang mendukung program tersebut meliputi:

- a. Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Sleman, dengan pagu Rp368.860.000,00 yang dirinci untuk pembentukan Pokja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli dan bahan raperda. Realisasi fisik dilaporkan 77,4%* dari target 100%*, sedangkan untuk keuangan dari target Rp285.505.500,00 terealisasi baru dilaporkan pengajuan SP2D sebesar Rp115.079.500,00.
- b. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman, dengan pagu Rp91.000.000,00 dengan rincian terbentuknya tim pelaksanaan kegiatan dan terlaksananya Sosialisasi Budaya Pemerintahan bagi pejabat Esselon IV promosi periode 2018-2019. Realisasi fisik dilaporkan 58%* dari target 100%*, adapun untuk keuangannya dari anggaran kas Rp69.280.000,00 baru dilaporkan SP2D sebesar Rp40.334.000,00.

G. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota

Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersifat Khusus (BKK) dari Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp2.319.000.000,00 adapun bantuan keuangan kepada desa meliputi Desa Kepuharjo (Rp400.062.700,00) dan Desa Wonokerto (Rp900.000.000,00). Realisasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH (dikelola Dinas Sosial) dengan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dilaksanakan pada 8 desa di Kecamatan Tempel. Target tahunan dengan volume 150 KPM saat

ini dalam proses SK Gubernur setelah dilakukan verifikasi dan cadangan 175 calon kelompok penerima manfaat.

2. Kegiatan Jambanisasi dengan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 untuk membangun sarana pembuangan khususnya jamban bagi rumah tangga yang belum memiliki jamban dan penggantian jamban yang tidak layak (dikelola Dinas Kesehatan). Lokasi pelaksanaan kegiatan di desa Tridadi, Sleman (75 KK) dan Margorejo, Seyegan (75 KK).
3. Padat karya infrastruktur melalui kegiatan Cor Blok Jalan (dikelola Dinas Tenaga Kerja) dengan anggaran sebesar Rp1.149.000.000,00 dan dilaksanakan di 11 lokasi di Kecamatan Minggir, Moyudan, Cangkringan, Prambanan, dan Godean. Tahap yang dilakukan saat ini berupa pengadaan material bantuan.
4. Bantuan keuangan kepada Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman sebesar Rp400.062.700,00 dipergunakan untuk pembangunan sarana lingkungan (jalan lingkungan, drainase, dan talud) di Huntap Batur. Realisasi sampai dengan triwulan II belum ada laporan.
5. Bantuan keuangan kepada Desa Wonokerto, Turi, Kabupaten Sleman sebesar Rp900.000.000,00 dipergunakan untuk barak pengungsian. Realisasi sampai dengan triwulan II belum ada laporan.

H. Program Penanggulangan Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2018 sebesar 8,77% atau setara dengan 31.355 KK. Adapun pada tahun 2019, penurunan angka kemiskinan ditargetkan menjadi 8,68%. Sedangkan berdasarkan angka makro (BPS) persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebesar 7,65% atau sebanyak 92.040 jiwa, dan ditargetkan menjadi 6,87% pada tahun 2019, jika mengacu pada dokumen RPJMD DIY 2017 – 2022. Untuk mewujudkan target tersebut beberapa intervensi yang sudah dilakukan pada tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang didanai dari APBN:
 - Bantuan pangan non tunai (BPNT), realisasi sebesar Rp5.754.430.000,00 dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 52.313 KPM;
 - Bantuan Program Keluarga Harapan, realisasi sebesar Rp58.072.400,00 dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 46.188 KPM;
 - Bantuan Lanjut Usia alokasi anggaran sebesar Rp880.000.000,00 untuk 440 orang penerima manfaat;
 - Bantuan rehab RTLH sebesar Rp6.125.000.000 untuk 350 unit;
- 2) Kegiatan yang didanai dari DAK, berupa bantuan rehab RTLH alokasi anggaran sebesar Rp2.975.000.000,00 untuk 170 unit. Realisasi saat ini sebesar 10%, yakni dalam proses verifikasi penerima bantuan.
- 3) Kegiatan dari APBD Pemda DIY
 - Bantuan keuangan khusus (BKK) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Graduasi PKH alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dengan target untuk 150 penerima

manfaat di 8 desa Kecamatan Tempel, sampai saat ini dalam proses menunggu SK dari Gubernur;

- Bantuan keuangan khusus (BKK) pembuatan jamban dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dengan target untuk 150 penerima manfaat. Berlokasi di Desa Tridadi Kecamatan Sleman 75 KK dan Desa Margorejo Kecamatan Seyegan 75 KK.

4) Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Sleman

- Pemberian Uang jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.000.000,00, target sasaran 110 orang @ Rp300.000,00 belum terealisasi;
- Bantuan Kepala Keluarga Miskin non potensial dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00, target sasaran 10 KK belum terealisasi;
- Bantuan Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dengan alokasi anggaran Rp720.000.000,00, target sasaran 300 orang, belum terealisasi;
- Bantuan Kebutuhan dasar anak Panti dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00, dengan target sasaran 35 LKS @ Rp10.000.000,00, belum terealisasi;
- Bantuan Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang sudah terbentuk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00, target sasaran 10 kelompok @ Rp4.000.000,00, belum terealisasi;
- Bantuan Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) baru, dengan alokasi anggaran Rp160.000.000,00, dengan target sasaran 80 orang @ Rp2.000.000,00, belum terealisasi;
- Bimbingan lanjut KUBE dengan alokasi anggaran Rp70.000.000,00, dengan target sasaran 10 kelompok @ Rp7.000.000,00, belum terealisasi;
- Program Jaring pengaman Sosial (JPS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00, target sasaran 600 pemohon, terealisasi sebesar Rp998.740.000,00 (20%) dengan jumlah pemohon sebesar 430 pemohon;
- Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.000.000,00, target 13 unit, belum terealisasi;
- Bantuan untuk peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00, target 10 LKS, belum terealisasi ;
- Pembayaran premi BPJS bagi warga miskin, rentan miskin dan pekerja bukan penerima upah dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.019.140.000,00, target sasaran 108.765 orang, sudah terealisasi sebesar Rp5.682.840.000,00 (19%);
- Bantuan beasiswa pendidikan dasar dan retriaval dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00, dengan target sasaran 3.500 siswa untuk beasiswa pendidikan dasar dan 50 siswa untuk biaya retriaval belum terealisasi;
- Bantuan rehab RTLH dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 dengan target sasaran 600 unit, saat ini sudah terealisasi Rp600.000.000,00 (10%)

Alokasi per rumah rata-rata mendapat bantuan 10 juta s.d. 15 juta sesuai dengan kondisi rumah.

I. Catatan dan Rekomendasi :

Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan yang sebesar 43,25% memiliki deviasi 3,49% dari target dan cenderung meningkat dari deviasi pada Triwulan I. Kondisi tersebut didukung data adanya peningkatan jumlah kegiatan dengan deviasi fisik > 5% dari 29,97% kegiatan di Triwulan I menjadi 31% kegiatan pada Triwulan II. Penyebab deviasi diantaranya karena mundurnya jadwal pekerjaan fisik di lapangan karena pada beberapa tender pekerjaan mengalami gagal lelang sehingga harus dilakukan tender ulang. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan identifikasi secara lebih mendalam terhadap masing-masing hambatan pelaksanaan dengan mengoptimalkan sistem pelaporan dari seluruh OPD, sehingga dapat diberikan saran/rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan di triwulan selanjutnya. Apalagi jika mempertimbangkan masih cukup banyak kegiatan dengan nilai yang besar (± 40 paket tender), disinyalir mundur dari tata kala yang dijadwalkan semula.
- 2) Realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman hingga akhir Triwulan II dilaporkan sebesar Rp410.890.152.745,98 atau 29,93% dari target anggaran kas. Deviasi antara target dengan realisasi keuangan yang sebesar 15,74% juga meningkat tajam dari kondisi Triwulan I dengan angka deviasi 4,83%. Kondisi tersebut sebenarnya kontradiksi dengan adanya penurunan jumlah kegiatan dengan deviasi keuangan > 10%, dari sebanyak 47,26% kegiatan di Triwulan I, menjadi sejumlah 26% kegiatan pada Triwulan II. Memperhatikan hal tersebut terdapat kemungkinan gap cukup besar terjadi hanya pada beberapa kegiatan yang nilainya besar, oleh karenanya agar dilakukan pencermatan terhadap deviasi yang terjadi utamanya pada belanja barang/jasa dan modal. Secara umum untuk realisasi keuangan yang bersifat menyesuaikan kebutuhan, sisa pengadaan barang/jasa, dan upaya efisiensi yang telah dilakukan perlu mendapat apresiasi, namun untuk hal-hal yang bersifat keterlambatan/ketidak sesuaian dengan tata kala perlu menjadi perhatian khusus, termasuk pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tata kala, karena harus dilakukan tender ulang. Mempertimbangkan realisasi keuangan hingga akhir TW II yang masih belum optimal, akselerasi perlu ditingkatkan antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa kendala secara lebih mendalam, sehingga ada upaya terobosan untuk memastikan belanja pemerintah pada triwulan berikutnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memberikan dampak kepada perekonomian Kabupaten Sleman pada umumnya serta masyarakat pada khususnya.

- 3) Kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme tender sampai dengan akhir Triwulan II mencapai 159 paket dengan nilai Rp115.517.802.600,83. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket tender yang dimiliki yakni 270 paket, maka Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki pekerjaan rumah untuk penyelesaian tender sebanyak 111 paket. Mencermati hal tersebut, agar dilakukan percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap paket pekerjaan yang sudah dalam pelaksanaan fisik oleh penyedia barang/jasa, untuk memastikan kualitas hasil pengadaan tetap terjaga. Demikian halnya terhadap 39 paket gagal lelang yang mundur dari jadwal dan tentunya berpengaruh pada kecukupan waktu pelaksanaan di lapangan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mohon dapat dipastikan selaras dengan mandat keistimewaan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi harus dilakukan dengan cermat dan aktif melakukan koordinasi dengan pengampu kepentingan terkait. Secara umum realisasi pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan oleh KPA di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman, hingga akhir Triwulan II, masih perlu dioptimalkan, meskipun realisasi kegiatannya secara umum sudah memenuhi target. Untuk itu diperlukan upaya percepatan dengan tetap memperhatikan tertib administrasi serta menjaga kualitas pelaksanaannya. Perlu diingatkan bahwa tata kelola keuangan dana keistimewaan pencairannya melalui mekanisme termin, saat ini dibutuhkan capaian realisasi minimal 80% untuk mengajukan termin berikutnya (Tahap II), oleh karenanya dimohon agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan segera diikuti dengan pertanggungjawaban keuangannya. Secara khusus pengendalian internal terhadap pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan juga agar ditingkatkan, sebagai pembelajaran jika pada tahun anggaran berikutnya alokasi danais benar-benar dilakukan melalui mekanisme BKK (masuk ke APBD) Pemerintah Kabupaten.
- 5) Bantuan keuangan dari Pemda DIY yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan mohon dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk teknis yang ada sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan bisa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten Sleman maupun antar OPD teknis diharapkan pelaksanaan BKK dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Sleman dimohon juga memberikan pendampingan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan Pemda DIY kepada Pemerintah Desa yang menerima.

- 6) Desain penanggulangan program kegiatan penurunan kemiskinan pada 2019 sudah cukup komprehensif yakni bisa memetakan dukungan APBN, APBD Provinsi, hingga APBD Kabupaten. Mencermati kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas, maka diperlukan identifikasi dukungan pembiayaan non-APBD atau berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang sampai dengan Triwulan II belum terlihat kontribusinya. Untuk itu, identifikasi kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui CSR perlu didalami dan didata lebih mendalam. Termasuk halnya, perlunya Pemerintah Kabupaten Sleman mengkoordinir alokasi dan intervensi penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

- 7) Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan II, secara umum masih diperlukan pengendalian yang lebih cermat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan refleksi terhadap progress pelaksanaan yang sudah dilakukan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 ini, antara lain dalam hal kinerja fisik dan keuangan, pelaksanaan tender barang/jasa, pelaksanaan dana keistimewaan, upaya pengurangan kemiskinan, serta target kinerja lainnya. Agar dipastikan bahwa upaya dalam mencapai target-target tersebut sudah berjalan dengan baik, melakukan koordinasi yang intensif dengan *stake holder*, dan merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Demikian disampaikan laporan atas pelaksanaan pengendalian pembangunan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019. Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah Saudara lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan kami berharap kinerjanya semakin dioptimalkan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Juli 2019

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGGU BUWONO X